

**PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS  
(Studi Analisis Pasal 1057 KUH Perdata)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:  
**ACHMAD ADIB**  
NIM: 2101063

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp	: 4 (Empat) Eksemplar	Semarang, Juni 2008
Hal	: Naskah Skripsi	Kepada Yth.
	a.n. Sdr. Achmad Adib	Dekan Fakultas
		Syari'ah IAIN Walisongo
		Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Achmad Adib  
NIM : 2101063  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiah  
Judul Skripsi : PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI  
WARIS (Studi Analisis Pasal 1057 KUH Perdata)

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 Juli 2008

Pembimbing

Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 150 274 615



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Km. 2 Ngaliyan Telp/fax (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Achmad Adib  
NIM : 2101063  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyah  
Judul Skripsi : PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI  
WARIS (Studi Analisis Pasal 1057 KUH Perdata)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo  
Semarang dinyatakan lulus tanggal:

**29 Juli 2008**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Satrata Satu  
(S.1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 29 Juli 2008

Mengetahui

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang,

Anthin Lathifah M. Ag  
NIP. 150 318 016

Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 150 274 615

Penguji I

Penguji II

Drs. Ghufron Ajib, M. Ag  
NIP. 150 254 235

Ali Imron, M. Ag  
NIP. 150 327 107

Pembimbing I

Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 150 274 615

## MOTTO

قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلمواها فانها نصف العلم وهو ينسي وهو اول شيء ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدر قطني)<sup>1</sup>

*“Nabi bersabda : pelajilah ilmu faraid dan ajarkanlah dia (kepada orang lain) karena ilmu faraidh itu separuh ilmu dan dia mudah dilupakan serta dia pula yang pertama-tama sesuatu yang akan dicabut dari umatku”.*  
(HR. Ibnu Majad dan Darul Quthny).

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar, Syarh al-Muntaqa al-Akbar, Kitab al-Faraid*, juz 6, al-Babi al-Halaby wa Auladuhu, Mesir, 1347H, hlm. 41.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Juli 2008

Deklarator,

Achmad Adib  
NIM: 2101063

## **PERSEMBAHAN**

*Karya sederhana ini*

*Penulis persembahkan secara khusus kedua orang tuaku yang selalu  
mendo'akanku tat kala badai cobaan melintas dalam hidup ini.*

## **ABSTRAK**

Achmad Adib (2101063) PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS (Studi Analisis Pasal 1057 KUH Perdata). Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan waris menurut KUH Perdata Pasal 1057 tentang penolakan harta warisan, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap ketentuan KUH Perdata Pasal 1057 tentang penolakan harta warisan.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana ketentuan waris menurut KUH Perdata Pasal 1057 tentang penolakan harta warisan?, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap ketentuan KUH Perdata Pasal 1057 tentang penolakan harta warisan?

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Dalam analisis data ini penulis akan menganalisa data dari uraian tentang ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya Pasal 1057 tentang hak menolak warisan. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa / data tertentu yang berarti sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Atau dengan kata lain metode deduktif adalah metode yang pembahasannya dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum agar diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus dilakukan dengan tegas (tanpa syarat) dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum terbukanya harta warisan. Syarat lain bagi yang ingin menolak harta warisan adalah harus dilakukan setelah peristiwa kematian.

Dalam Islam mengenai harta warisan sudah diatur sedemikian rupa, akan tetapi dari pihak yang bersangkutan ada yang menolak atau menghendaki penolakan tersebut, boleh saja asalkan dengan dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan tidak mempunyai tujuan lain dibalik penolakan yang dilakukannya tersebut.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia dan pertolongan-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad saw., karena berkat perjuangan beliau hingga saat ini kita dapat menyelesaikan kehidupan manusia yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul *"Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris (Studi Analisis Pasal 1057 KUH Perdata)"*.

Penulis yakin bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa rahmat Allah SWT serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang beserta stafnya.
2. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan rasa tulus ikhlas dan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-temanku semua yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi.



Akhirnya penulis juga mengharap mudah-mudahan karya tulis yang berwujud skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu sumbangan dalam keilmuan. Kemudian terhadap segala koreksi ilmiah serta saran demi perbaikan skripsi ini senantiasa akan penulis terima dengan tangan terbuka dan dengan hati yang lapang. Mudah-mudahan tulisan ini bias bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin...*

Semarang, 29 Juli 2008  
Penulis

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian waris.....	13
B. Dasar Hukum Waris.....	17
C. Syarat, sebab dan rukun waris .....	20
D. Penghalang waris .....	24
E. Asas-asas Hukum Waris Islam .....	29
1. Asas-asas waris dalam Islam .....	29
2. Hikmah Waris Dalam Islam .....	35
3. Ahli waris dan macam-macamnya.....	38

<b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KUH PERDATA .....</b>	<b>42</b>
A. Waris Menurut KUH Perdata.....	42
1. Pengertian .....	42
2. Unsur-unsur Pewarisan .....	43
3. Syarat-syarat Pewarisan .....	45
4. Kelompok-kelompok Ahli Waris.....	48
5. Penerimaan dan Penolakan Warisan.....	56
6. Ketidakpatutan Menjadi Ahli Waris .....	59
B. Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata .....	63
 <b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KUH PERDATA PASAL 1057 .....</b>	 <b>68</b>
A. Analisis Terhadap Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam .....	68
B. Analisis Terhadap Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata Pasal 1057.....	78
 <b>BAB V : PENUTUP.....</b>	 <b>89</b>
A. Simpulan .....	89
B. Saran-saran.....	91
C. Penutup .....	91

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **BIODATA MAHASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD ADIB

Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 31 Agustus 1981

Alamat : Jl. Sri Rejeki Utara XIV Rt.01 Rw.I No.9 Kalibanteng  
Kidul Semarang Barat

Nama Orang Tua

Bapak : Farchan Hadi

Ibu : Machmudah

Alamat : Jl. Sri Rejeki Utara XIV Rt.01 Rw.I No.9 Kalibanteng  
Kidul Semarang Barat

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juni 2008  
Penulis

Achmad Adib

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Achmad Adib  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 31 Agustus 1981  
Alamat Asal : Jl. Sri Rejeki Utara XIV Rt.01 Rw.I No.9  
Kalibanteng Kidul Semarang Barat

Alamat Kost : -

Jenjang Pendidikan :

1. MI Ma'hadul Ulum Wedung Demak Lulus Tahun 1995
2. MTs I'ANATUTH THULLAB Wedung Demak Lulus Tahun 1998
3. MAN 01 Semarang Lulus Tahun 2001
4. IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah Angkatan 2001

Semarang, Juni 2008  
Penulis

Achmad Adib

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai agama wahyu, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia. Aspek-aspek ajaran Islam tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu aspek ajaran Islam tersebut adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kewarisan. Kewarisan merupakan salah satu masalah yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an, yang pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajarannya yang pokok. Dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka eksistensinya harus dijalankan dalam bentuk praktek faktual. Pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.

Persoalan waris merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan yang berkembang dalam dunia hukum Islam. Waris sebagai sebuah aktifitas keagamaan yang erat kaitannya dengan persoalan keadilan dan hubungan antar keluarga menjadi menarik untuk dikaji apabila telah sampai pada persoalan pembagian. Hal ini dikarenakan masyarakat (umat) Islam akan “berusaha” untuk menjalankan pembagian waris sesuai dengan hukum Islam yang telah berlaku. Namun perlu dikemukakan bahwa pembagian waris sesuai

hukum Islam sekarang ini kiranya belum dapat berjalan optimal dan universal, masih banyak masyarakat yang dalam praktek pembagian waris masih mengacu pada traktat-traktat, norma-norma dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat belum dapat sepenuhnya menjalankan syari'at tentang waris.

Fenomena di atas lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan individu atau kelompok, sehingga mereka cenderung untuk “melupakan” syari'at waris sementara waktu demi pertimbangan yang mereka rasa lebih signifikan dalam lingkup individu maupun kelompok mereka masing-masing. Faktor-faktor seperti keadilan, kedamaian yang dikedepankan di antara mereka dijadikan *starting point* untuk melangkah pembagian waris yang mereka kehendaki. Dari sini kiranya dapat dimengerti bahwa mereka mencari mekanisme atau metode dan landasan yang dapat mengantarkan mereka pada pembagian waris yang tidak menimbulkan konflik.

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu

kewarisan akibat kematian.<sup>1</sup> Oleh karena itu pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang pewaris jika ia meninggalkan hutang.

Dengan demikian jelaslah bahwa waris itu di satu sisi berakar pada keluarga dan di lain sisi berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menurut Hukum Islam, salah satu prinsip kewarisan adalah bersifat *ijbari* (memaksa). Menurut Mohammad Daud Ali maksud dari asas *ijbari* bahwa peralihan harta dari pewaris ke ahli waris berjalan dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT. Dalam pengertian lain menurut sistem kewarisan Islam (*faraidh*), seorang ahli waris “dipaksa” untuk menerima harta waris dari pewaris.<sup>2</sup>

Di samping itu masalah harta pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan

---

<sup>1</sup>A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 6.

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 281-282.



siapa yang tidak berhak. Dan setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan kekeluargaan. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh yang lain dianggap tidak adil.<sup>3</sup> Meskipun pada dasarnya semua ahli waris mau menerima harta warisan, akan tetapi ada fenomena di tengah-tengah masyarakat, bahwa sebagian mereka ada yang menolak menerima harta warisan tersebut. Fenomena tersebutlah yang menjadikan penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Hal ini didasarkan pada asumsi awal bahwa “mungkinkah ada ahli waris yang tidak mau menerima harta warisan”.

Kemudian kaitannya dengan adanya penolakan ahli waris tersebut terhadap harta warisan yang ada, maka dalam Pasal 1057 KUH Perdata dijelaskan bahwa *“penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka”*. Jadi asas pokok yang dimuat dalam Pasal 1057 KUH Perdata tersebut adalah bahwa pada dasarnya orang atau ahli waris boleh menolak pemberian harta warisan yang diberikan kepadanya. Asas tersebut selanjutnya harus ditafsirkan bahwa orang yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Konsekuensi tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewarisi bagi seorang penggantinya.

Dari uraian di atas, timbul suatu persoalan bagaimana ketentuan penolakan terhadap harta warisan oleh ahli waris, maka dari itu penulis ingin

---

<sup>3</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 4.

membahasnya lebih jauh lagi dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul *“Penolakan Harta Warisan oleh Ahli Waris (Studi Analisis Pasal 1057 KUH Perdata)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap ketentuan KUH Perdata Pasal 1057 tentang penolakan harta warisan?
2. Bagaimana ketentuan waris menurut KUH Perdata Pasal 1057 tentang penolakan harta warisan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi**

Dengan mengungkapkan uraian di atas, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap ketentuan KUH Perdata Pasal 1057 tentang penolakan harta warisan.
2. Untuk mengetahui ketentuan waris menurut KUH Perdata Pasal 1057 tentang penolakan harta warisan.

Di samping itu secara objektif, penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan khalayak umum. Di antara manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai kajian keilmuan untuk mendalami dan mengembangkan konsep tentang warisan khususnya dalam hal penolakan harta warisan oleh ahli waris.
- b) Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terkait dengan persoalan ini.

### 2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pengelola dan pengatur dalam hal ini pihak pengadilan negeri, terhadap harta pusaka atau harta warisan tentang bagaimana nanti jika terjadi penolakan oleh ahli waris terhadap harta warisan yang ada tersebut, sehingga mereka mampu mewujudkan perdamaian dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
- b) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pengelola harta pusaka atau harta warisan tersebut, sehingga sebagai representasi dari pemberdayaan sumber daya masyarakat yang ada.

## **D. Telaah Pustaka**

Penulis menyadari bahwasanya penelitian tentang penolakan harta warisan bukanlah hal yang sama sekali baru, banyak tulisan yang membahas tentang warisan baik secara detail maupun secara umum. Tulisan-tulisan tersebut di antaranya; Buku karya Ahmad Rofiq, dengan judul "*Hukum Islam*

*di Indonesia*”. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai ketentuan umum tentang hukum kewarisan, penyebab dan penghalang saling mewarisi. Akan tetapi dalam buku tersebut secara eksplisit tidak disebutkan mengenai penolakan ahli waris terhadap pemberian harta warisan. Hal ini yang membedakan dengan penelitian penulis yang lebih berfokus pada penolakan ahli waris terhadap harta warisan.

Muhammad Bagir al-Habsy, dengan karyanya yang berjudul *“Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*”. Dalam karya tersebut dijelaskan mengenai pembagian harta warisan. Di samping itu pula dijelaskan mengenai faktor yang mengurangi ataupun yang meniadakan bagian warisan dan dijelaskan pula mengenai beberapa penghalang pewarisan. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni lebih terfokus pada penolakan terhadap harta warisan yang dilakukan oleh ahli warisan.

Sofiatul Chusna dalam skripsinya dengan judul *"Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata"*. Hasil penelitiannya adalah hanya sebatas mengkomparasikan hak waris anak dalam kandungan, baik dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata, sehingga akhir penelitiannya disimpulkan bahwa bagian warisan anak dalam kandungan menurut hukum Islam adalah diberikan bagian yang paling menguntungkan di antara dua perkiraan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Sedangkan menurut hukum perdata diberikan bagian yang sama besarnya dengan bagian ahli waris lainnya.

Dari penelitian dan kajian tentang warisan dalam karya-karya tersebut di atas, penelitian ini berbeda karena lebih spesifik tentang waris kaitannya dengan penolakan oleh harta warisan oleh ahli waris. Sehingga dengan kajian spesifik ini diharapkan dapat dikemukakan suatu pemikiran tentang penolakan harta warisan oleh ahli waris secara *komprehensif-interpretatif* dan pada akhirnya diharapkan bisa memberi kontribusi dalam pengelolaan dan mewujudkan perdamaian dalam hal harta pusaka tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan riset kepustakaan (*library research*),<sup>4</sup> yaitu dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan kemudian menganalisisnya guna memperoleh data-data yang diperlukan serta ada relevansinya.

### **2. Sumber data**

#### **a. Sumber data primer**

Adapun sumber data primer (data utama) dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya Pasal 1057 tentang hak menolak warisan.

#### **b. Sumber data sekunder**

Sedangkan sumber sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang membahas waris secara umum, dan buku-buku yang menganalisa mengenai waris dalam Islam ditambah dengan

---

<sup>4</sup> Surisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm. 11.

data pendukung dan pelengkap yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data-data yang bersifat kepustakaan dan berdasarkan literatur, sehingga *library research* merupakan metode yang penulis terapkan dalam pengumpulan data. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini menggunakan suatu teknik observasi terhadap literatur-literatur serta karya-karya ilmiah lain yang berkaitan erat dan relevan dengan objek penelitian ini. Literatur yang diperlukan tersebut meliputi buku-buku yang membahas mengenai waris secara umum dan buku-buku yang menganalisa mengenai waris dan penolakan harta warisan oleh ahli waris.

### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis,<sup>5</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Dalam analisis data ini penulis akan menganalisa data uraian tentang ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya Pasal 1057 tentang hak menolak warisan.

---

<sup>5</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 63.

Dalam menganalisis data pada pendekatan ini penyusun menggunakan metode deduktif,<sup>6</sup> yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenal suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa / data tertentu yang berarti sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Atau dengan kata lain metode deduktif adalah metode yang pembahasannya dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum agar diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>7</sup>

##### 5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif di sini diartikan sebagai pendekatan yang bersifat doktrinal yang bersifat asli tanpa menggunakan rekayasa pemikiran manusia sama sekali.<sup>8</sup> Sedangkan pendekatan filosofis diartikan sebagai pendekatan yang memerlukan perenungan yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi.<sup>9</sup> Kedua pendekatan ini penulis gunakan dalam rangka mengetahui sejauh mana ketentuan-ketentuan mengenai harta warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya Pasal 1057 tentang hak menolak warisan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap ketentuan tersebut.

---

<sup>6</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet 1, hlm. 40.

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM Press, tth., hlm. 36.

<sup>8</sup> Abdudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 28.

<sup>9</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, cet. 1, hlm. 100.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mendapatkan bentuk karya ilmiah yang sistematis dan kronologis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Umum tentang Ketentuan Waris Menurut Hukum Islam. Dalam bab ini dijelaskan mengenai; pengertian waris dan dasar hukum waris, syarat, sebab dan rukun waris, penghalang waris, asas-asas hukum kewarisan Islam dan ahli waris dan macam-macamnya.

Bab III Tinjauan Umum tentang Ketentuan Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata Pasal 1057. Dalam bab ini dijelaskan mengenai dua hal yakni; *Pertama*, Ketentuan Waris Menurut KUH Perdata, yang pembahasannya meliputi; pengertian, unsur-unsur pewarisan, syarat-syarat pewarisan, kelompok-kelompok ahli waris, penerimaan dan penolakan warisan dan ketidakpatutan menjadi ahli waris. *Kedua*, Ketentuan Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata Pasal 1057.

Bab IV Analisis Terhadap Penolakan Harta Warisan oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata Pasal 1057. Bab ini berisikan dua analisis, yakni analisis terhadap penolakan harta warisan oleh ahli waris menurut KUH Perdata pasal 1057 dan analisis terhadap penolakan harta warisan oleh ahli waris menurut hukum Islam.



Bab V Penutup. Dalam bab ini berisi simpulan, saran-saran, dan kata penutup dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Waris

Waris merupakan salah satu aturan fiqhiyah dalam bidang muamalah yang telah diterangkan secara tegas dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat dan hadits Nabi yang memuat dan menjelaskan masalah pewarisan tersebut secara tegas. Kata “waris” yang sudah populer di dalam bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Arab وريث sebagai fiil dan isim masdarnya ميراث dan dijamakkan menjadi <sup>1</sup> موارث. Di dalam al-Qur'an ada beberapa lafad وريث yang diterjemahkan sebagai berikut:

1. Mengganti kedudukan, sebagaimana firman Allah:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ... (النمل: 16)

Artinya : “Dan Sulaiman telah mengganti kedudukan Daud...(QS. An-Naml: 16)<sup>2</sup>

2. Menganugerahkan atau memberi, sebagaimana firman Allah:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ... (الزمر: 74)

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 496.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 595.

Artinya: *Dan mereka mengucapkan: segala puji bagi Allah yang memenuhi janjinya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini. (QS. Az-Zumar: 74)*<sup>3</sup>

3. Menerima warisan, sebagaimana firman Allah :

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ.... (مریم: 6)

Artinya: *Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'kub. (QS. Maryam: 6).*<sup>4</sup>

4. Menerima pusaka atau amanat, firman Allah:

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.... (الاعراف: 128)

Artinya: *Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah, dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya.... (QS. Al-A'raf: 128).*<sup>5</sup>

Menurut bahasa, arti waris adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, sedangkan menurut istilah adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak, tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara'.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam warisan disebut sebagai hukum waris yang mempunyai arti hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 756.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 462.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

<sup>6</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.

pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>7</sup>

Dalam redaksi lain, Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa warisan yaitu suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.<sup>8</sup> Kemudian menurut Ahmad Rofiq mengemukakan bahwa warisan dalam hukum Islam dikenal dengan menggunakan ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.<sup>9</sup>

Hukum waris, sering dikenal dengan istilah فرائض<sup>10</sup> bentuk jamak dari kata tunggal فريضة artinya ketentuan. Kata فريضة berasal dari kata فرض lafad فرض secara bahasa dapat berarti التقدير yang menurut syara' berarti bagian-bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris di mana bagi laki-laki terdapat 10 orang dan bagi golongan perempuan ada 7 orang.<sup>11</sup> Sedangkan menurut ulama fiqh

---

<sup>7</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001, hlm. 360.

<sup>8</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 9.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. Revisi, 2002, hlm. 3

<sup>10</sup> *Dalam Ensiklopedi Hukum Islam*, Editor Abdul Azis Dahlan, dkk., Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 307-308. Menyebutkan *faraid* sebagai ilmu yang membahas masalah pembagian harta warisan; disebut juga dengan ilmu waris. Para ahli ilmu faraid mendefinisikannya sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan harta peninggalan (harta pusaka), cara menghitung bagiannya, serta bagian masing-masing ahli warisnya. Sebab-sebab terputusnya saling mewaris, bagian dari masing-masing ahli waris, dan dasar hukumnya.

<sup>11</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Mulabari, *Terjemahan Fath al-Mu'in*, Toha Putra, Semarang, t.th, hlm. 95.

kata فرض dalam masalah waris bagian yang ditetapkan oleh syara' untuk ahli waris, misalnya,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Setelah membahas dua kata وراث dan فرائض maka dapat dimengerti ternyata ada kesamaan arti dan tujuan antara kedua kata tersebut dalam pembahasan tentang waris ini, sehingga pembahasan mengenai fiqh mawaris sama dengan pembahasan mengenai *fiqh al-Faraid*. Dalam istilah sehari-hari, fiqh mawaris disebut dengan hukum warisan yang merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Perbedaannya fiqh mawaris identik dengan hukum waris Islam sedangkan hukum warisan mempunyai konotasi umum, artinya bisa mencakup waris adat atau waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>13</sup>

Dalam mempelajari mengenai pewarisan, maka terlebih dahulu harus dimengerti arti tentang fiqh mawaris. Adapun ilmu mawaris menurut fuqaha adalah:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: *Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.*<sup>14</sup>

Karena ilmu ini banyak membicarakan hak-hak para ahli waris yang telah ditentukan kadar / bagian secara pasti, maka di kalangan fuqaha terkenal dengan sebutan faraid yaitu:

---

<sup>12</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 5.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 2

<sup>14</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 18.

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك من التركة لكل  
ذی حق<sup>15</sup>

Artinya: *Ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan, yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.*

*Faraid* adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang pembagian hak setiap ahli waris, karena itu Nabi sangat menganjurkan untuk belajar dan diharapkan mengamalkan kepada orang lain. Sebagaimana perintah Nabi yang dituangkan dalam hadits yang berbunyi:

قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلمواها فانها نصف العلم وهو ينسي وهو اول شيئي ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدر قطني)<sup>16</sup>

Artinya : *“Nabi bersabda : pelajirlah ilmu faraid dan ajarkanlah dia (kepada orang lain) karena ilmu faraidh itu separuh ilmu dan dia mudah dilupakan serta dia pula yang pertama-tama sesuatu yang akan dicabut dari umatku”.* (HR. Ibnu Majad dan Darul Quthny).

## B. Dasar Hukum Waris

Hukum waris dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an, juga didasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW, pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati, yaitu:

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11:

<sup>15</sup> Al-Syarbani, *Mughni al Muhtaj*, juz 3, Dar al-Fikr, Beirut-Libanon , t.th., hlm. 3

<sup>16</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar, Syarh al-Muntaqa al-Akbar, Kitab al-Faraid*, juz 6, al-Babi al-Halaby wa Auladuhu, Mesir, 1347H, hlm. 41.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء: 11)

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 11).<sup>17</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالَالَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. (النساء: 12)

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 117.

Artinya : *“Dan bagimu (suami isteri) berdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.* (QS. An-Nisa’ : 12).<sup>18</sup>

## 2. Al-Sunnah

الحقوا الفرائض باهلها فمابقي فلاولى رجل ذكر.<sup>19</sup> (متفق عليه)

Artinya : *Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”. (HR. Muttafaq ‘alaih)*

3. Ijma’, yaitu kesepakatan para ulama / sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur’an maupun sunnah.

<sup>18</sup> Ibid. hlm. 117.

<sup>19</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* juz 8, Mjdl.4, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M., hlm. 4.



4. Ijtihad, yaitu pemikiran sahabat / ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati, misal tentang masalah *radd* dan *'aul*.<sup>20</sup>

### C. Syarat, sebab dan rukun waris

#### 1. Syarat-syarat waris

Ada tiga syarat waris yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1). Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadikan seseorang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki, atau mati menurut dugaan seperti seseorang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.<sup>22</sup> Kematian orang yang mewariskan itu harus jelas baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *takdir* (menurut dugaan).<sup>23</sup>
- 2). Hidupnya ahli waris setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya secara hukum. Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal.
- 3). Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 37

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 241.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981, hlm. 79.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 241.

## 2. Sebab-sebab Menerima Warisan

Menurut hukum waris Islam, ada tiga sebab mewarisi yaitu:

### a) Karena hubungan kekeluargaan

Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan di sini adalah hubungan darah / hubungan famili, hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak waris jika salah satu meninggal dunia, misalnya antara anak dengan orang tuanya.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: 7)

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabat, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (QS. An-Nisa': 7).*<sup>25</sup>

Kemudian dalam surat al-Anfal dijelaskan:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ....(الانفال: 75)

Artinya: *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah. (QS. Al-Anfal: 75).*<sup>26</sup>

### b) Hubungan Perkawinan

Setiap perkawinan yang sah menyebabkan saling mewarisi antara suami isteri, baik telah terjadi hubungan badan atau belum.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 116.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 274.

Apabila terjadi talak antara suami isteri dengan talak *raj'i*, sepanjang iddah belum habis maka keduanya tetap saling mewarisi. Talak bukan merupakan pemutus hubungan perkawinan, kecuali iddah wanita yang ditalak sudah habis.<sup>27</sup>

Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sebagian anggota masyarakat sering mempersoalkan untuk tidak mengatakan mempertentangkan antara ketentuan hukum agama dan hukum positif, sehingga menimbulkan implikasi, mereka merasa sah perkawinannya, apabila ketentuan hukum agama seperti syarat dan rukunnya terpenuhi.

Termasuk dalam ikatan perkawinan apabila isteri diceraikan oleh suaminya selama berada dalam masa tunggu (*iddah*). Alasannya wanita yang berada dalam masa tunggu (*iddah raj'i*) suaminya adalah yang

---

<sup>27</sup> Abdul Azis Dahlan dkk., *op. cit.*, hlm. 309. Namun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih mengenai isteri yang dijatuhkan talak *ba'in* ketika suaminya dalam keadaan sakit yang membawa kematiannya (talak *firar*: talak yang dijatuhkan dengan maksud agar isteri tidak mewarisi suami). Menurut Mazhab Hanafi, apabila iddahnya belum habis, isteri tersebut masih berhak mewarisi suaminya. Argumen yang mereka ajukan adalah bahwa tujuan menjatuhkan talak agar isteri tidak mewarisi suami dianggap tidak berlaku (tidak dapat diterima). Mazhab Hanbali berpendapat bahwa isteri tersebut tetap berhak mewarisi suaminya sekalipun sudah habis masa iddahnyanya selama isteri tersebut belum kawin lagi. Menurut Mazhab Maliki, isteri tersebut tetap berhak mewarisi suaminya sekalipun sudah habis masa iddahnyanya dan sudah kawin dengan pria lain. Alasan kedua mazhab tersebut ialah tindakan Usman bin Affan, khalifah ketiga, yang memberikan hak mewarisi kepada isteri Abdul Rahman bin Auf (w. 31 H/652 M) yang dijatuhkan talak ketika Abdul Rahman sakit (sakit yang membawa ajalnya) pada hal saat itu iddahnyanya sudah habis. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa isteri tersebut tidak berhak mewarisi suaminya, karena talak *ba'in* membawa akibat putusnyanya hubungan perkawinan tanpa dihalangi oleh iddah.

paling berhak merujukinya, karena itu statusnya dianggap masih terkait dengan perkawinan suaminya.<sup>28</sup>

Seseorang yang menjalani iddah talak raj'i berkedudukan sebagai isteri dengan segala akibat hukumnya kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur).<sup>29</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah al-Zuhailly,<sup>30</sup> bahwa perempuan (isteri) itu mendapatkan warisan dari suaminya jika ia dalam masa *iddah* karena disebabkan talak *raj'i* secara hukum adapun jika isteri tidak berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya walaupun dalam masa iddah walaupun seorang suami tersebut mentalak isterinya dalam keadaan sehatnya (tidak *haid*)".

c) Hubungan wala'

*Wala'* yaitu hubungan hukuman, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak azazi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala' al-'itqi*. Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 401.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984, hlm. 41.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VIII, Damsyiq: Dar al-Fikr, cet. III, hlm. 250.

### 3. Rukun Mawaris

Menurut Sayyid Sabiq rukun mawaris ada tiga yaitu:<sup>31</sup>

- 1). Pewaris (*al-Waarits*). Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai hubungan penyebab waris dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.
- 2). Orang yang mewariskan (*al-Muwarrits*) yaitu mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang atau dinyatakan mati.<sup>32</sup>
- 3). Harta yang diwariskan (*al-mauruuts*): disebut pula peninggalan dan warisan, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.

### D. Penghalang waris

Terhalangnya mendapatkan warisan atau disebut *mawani 'al irs* adalah hal yang menyebabkan gugurnya ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut adalah:

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14, Terj. Mudzakir A.S, Bandung: Al-Ma'arif, 1988, hlm. 240.

<sup>32</sup> Mati di sini dapat dikategorikan menjadi tiga macam: 1). Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia; 2). Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim, orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat; 3). Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal. Lihat Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 28-29.

## 1. Pembunuhan<sup>33</sup>

Kecuali kaum khawarij, para ulama bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya.<sup>34</sup> Ketentuan ini berdasarkan hadits Rasulullah yang artinya: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan walaupun korban itu bapaknya maupun anaknya”. (HR. Ahmad).<sup>35</sup> Di samping itu, ada kaidah fiqh yang berkaitan dengan masalah itu yakni: “barang siapa yang ingin mempercepat mendapatkan sesuatu waktunya, maka ia diberi sanksi tidak boleh mendapatkannya”.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Islam secara tegas melarang pembunuhan, khususnya sesama muslim (QS. al-Baqarah (2) : 178) karena pembunuhan salah satu bentuk kejahatan (dosa besar) dan mendapat hukuman di dunia. Sanksi hukumannya ialah qishash yaitu mengambil pembalasan yang sama sesuai yang dilakukan pembunuh dalam proses pembunuhan, kecuali jika pembunuh dapat pemaafan dari ahli waris terbunuh dengan cara membayar diat (ganti rugi). Pembunuhan dikatakan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori dosa besar. Menurut sistematika Hasan al-Banna ada tujuh (7) jenis kejahatan yaitu pembunuhan, penganiayaan besar (QS. 5 : 45), perampokan (QS. al-Maidah: 33), pencurian (QS. al-Maidah: 38), perzinahan (QS. an-Nur: 2), menuduh zina tanpa bukti (QS. an-Nur: 4), dan minum-minuman keras. Lihat Ishak Musa al-Husaini, *Ikhwanul Muslimin*, (terj.), Jakarta: Grafiti Press, 1993, hlm. 190-195.

Dalam kaitannya dengan hak mewarisi, maka orang yang membunuh pewaris ia tidak mendapat hak mewarisi dari pewaris tersebut. Hal ini tercantum secara tegas dalam sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa, seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

<sup>34</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981, hlm. 13

<sup>35</sup> Fatchur Rahman, *op.cit.*, hlm. 86.

<sup>36</sup> Kaidah tersebut berbunyi:

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه

yang maksudnya dalam mencegah suatu kejahatan atau sebagai penutup jalan bagi kemungkinan terjadinya suatu kejahatan, yakni dengan mengancam akibat yang akan diberikan kepadanya, dalam hal ini ialah tercegahnya suatu hak yang seharusnya ia terima karena melakukan perbuatan untuk mendapatkan hak itu sebelum tiba saatnya. Dalam hal ini masalah warisan, yang mana waktu pembagiannya adalah setelah matinya orang yang meninggalkan harta waris. Seandainya seorang ahli waris tergesa-gesa untuk mendapatkan bagian harta waris, dengan melakukan pembunuhan terhadap orang yang meninggalkan harta waris, tanpa suatu alasan yang dibenarkan syara', maka ia tercegah untuk menerima harta waris daripadanya. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawai'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 128-129.

Berangkat dari keterangan hadits dan kaidah fiqhiyah di atas sudah jelas bahwa pada dasarnya kejahatan merupakan suatu tindak kejahatan dan menjadikan penghalang bagi orang untuk mewaris.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Dalam hal pembunuhan dilakukan dengan sengaja, para ulama sepakat. Perbedaan para ulama mengenai pembunuhan yang tanpa sengaja, antara lain:

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan jenis apapun, tetap merupakan penghalang untuk mewaris. Dasarnya adalah keumuman hadits tersebut di atas.<sup>37</sup> Ulama Hanafiah membagi pembunuhan menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan langsung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi menjadi 4, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak dengan sengaja dan pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang membuat lubang dikebunnya, kemudian ada orang yang terperosok ke dalam lubang tadi dan meninggal dunia, matinya korban disebabkan perbuatan tidak langsung oleh orang yang membuat lubang tersebut.<sup>38</sup>

Jadi menurut ulama Hanafiah pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tak langsung, bukan merupakan penghalang untuk mewaris. Menurut ulama Hanabilah, bahwa

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 242

<sup>38</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 40.

setiap pembunuhan yang dikenai sanksi *qishash*<sup>39</sup> atau sanksi denda (*diat*) atau *kafarat*, menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan yang tidak dikenai sanksi tersebut tidak merupakan penghalang mendapatkan warisan.<sup>40</sup>

## 2. Berlainan Agama

Berlainan agama berarti agama pewaris berlainan dengan agama ahli waris, misalnya pewaris beragama Islam, sedangkan ahli waris beragama Kristen. Demikian juga sebaliknya. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.<sup>41</sup>

Artinya : *Diriwayatkan dari Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid bahwa Rasul SAW bersabda : orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Ini diperkuat dengan keumuman ayat 141 surat an-Nisa' sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ (النساء: 141)

<sup>39</sup> Sanksi *qishash* adalah sanksi kepada pembuat jarimah (larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*) dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya. Hukuman *qishash* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 279

<sup>40</sup> M. Ali al-Syabuni, *op.cit.*, hlm. 17

<sup>41</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuti, *Al-Jami' ash-Shaghir*, juz II, Indonesia: Dar Ihaya' al-Kutub al-'Arabiyah, tth., hlm. 204.



Artinya: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin).*

Penjelasan di atas dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan perbedaan agama adalah pada saat *muwarris* meninggal, karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku.

Sedangkan berlainan mazhab, menurut kesepakatan fuqaha bukan merupakan penghalang untuk mewaris,<sup>42</sup> karena mereka tetap sesama muslim.

### 3. Perbudakan

Mayoritas ulama sepakat bahwa perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan bertindak. Dengan kata lain, seorang budak tidak dapat menjadi subyek hukum, al-Qur'an surat an-Nahl ayat 75 menegaskan hal ini. Di samping itu status kekeluargaan dari kerabatnya dianggap putus karena ia sudah termasuk keluarga asing.<sup>43</sup> Untuk keadaan di Indonesia, faktor perbudakan ini sudah tidak relevan lagi, karena memang tidak pernah ada tradisi semacam itu. Apalagi Islam sendiri bertujuan untuk menghilangkan praktek perbudakan dengan jalan memberikan kemungkinan secara luas dan mudah melalui pelbagai institusi misalnya kompensasi *kaffarah* akibat pembunuhan “mirip sengaja” (QS. an-Nisa' (4) : 92).

---

<sup>42</sup> Rahman, *op.cit.*, hlm. 95-96

<sup>43</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Waris Islam (Study Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilinial) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*, Jakarta: Indo-Hillco, 1984, hlm. 40.

#### 4. Murtad

Orang murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam. Karena ia keluar dari Islam, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, alasannya karena salah satu faktor terjadinya pewarisan adalah hubungan keagamaan (Islam) di antara individu (yang berkeluarga).

Dasar hukum ditetapkannya orang murtad tidak mendapat warisan seperti disebutkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Bardah, yang menceritakan bahwa Abu Bardah telah diutus Nabi kepada laki-laki yang nikah dengan isteri bapaknya. Nabi memerintahkan agar Abu Bardah memenggal leher laki-laki itu dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia seorang murtad.<sup>44</sup>

### E. Asas-asas Hukum Waris Islam

#### 1. Asas-asas waris dalam Islam

Hukum waris Islam mempunyai corak tersendiri, itu merupakan bagian dari agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim. Asas hukum waris Islam yang dapat disalurkan dari al-Quran dan al-Hadits, itu adalah;

- 1) Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa

---

<sup>44</sup> Moh Rifa'i. dkk., *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 246.

digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur “memaksa” (*ijbari* = *compulsary*) dalam hukum waris Islam ini terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Allah di luar kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan.<sup>45</sup>

Asas *ijbari* hukum waris Islam ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu (a) dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 7. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa bagi laki-laki dan bagi perempuan ada *nasib* atau bagian (warisan) dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarga dekatnya. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau ahli waris. Karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya, tidak perlu meminta-minta haknya kepada (calon) pewaris. Unsur *ijbari* dapat dilihat juga dari segi (b) jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Ini tercermin dalam kata *mafrudan*

---

<sup>45</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 281-282.

yang makna asalnya adalah “ditentukan atau diperhitungkan”. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib yang terkandung oleh kata itu memaksa manusia untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah itu. Unsur *ijbari* lain yang ada dalam hukum waris Islam adalah (c) penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci dalam pengelompokan ahli waris di surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Karena rincian yang sudah pasti itu, maka tidak ada satu kekuasaan manusiapun yang dapat merubahnya. Dan, oleh karena unsurnya demikian, dalam perpustakaan, hukum waris Islam yang *sui generis* ini disebut juga bersifat *compulsary*, bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah itu.

- 2) *Asas Bilateral*. *Asas bilateral* dalam hukum waris berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176. Di dalam
  - a) ayat 7 ditegaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan. Ia berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya, b) Di dalam ayat 11 ditegaskan bahwa (i) anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya

dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan; (ii) ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam. Demikian juga ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak, c) Di dalam ayat 12 dijelaskan bahwa (i) bila seorang laki-laki mati punah, saudaranya yang laki-lakilah yang berhak atas harta peninggalannya, juga saudaranya yang perempuan berhak mendapat harta warisannya itu; (ii) bila pewaris yang mati punah itu seorang perempuan, maka saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, berhak menerima harta warisannya, d) Di dalam surat an-Nisa ayat 176 disebutkan bahwa (i) seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima harta warisannya; (ii) seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki, maka saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.

Ahli waris keluarga dekat (kerabat) lain yang tidak tersebut secara nyata di dalam al-Quran dapat diketahui dari penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah saw. Dapat juga diketahui dari perluasan pengertian ahli waris yang disebutkan dalam al-Quran. Misalnya, waris kakek dapat diketahui dari kata *abun* dalam al-Quran, yang dalam bahasa Arab, artinya kakek secara umum. Demikian juga

halnya dengan nenek, dapat dikembangkan dari perkataan *ummi* (*maternal* = *maternal grand mather* = nenek dari pihak ibu) yang terdapat dalam al-Quran. Di samping itu terdapat juga penjelasan dari Nabi tentang waris kakek dan waris nenek. Dari perluasan pengertian itu dapat pula diketahui garis kerabat ke atas melalui pihak laki-laki dan melalui pihak perempuan.<sup>46</sup>

Demikian juga halnya dengan garis kerabat ke bawah. Walaupun tidak secara jelas disebut dalam al-Quran, namun, garis kerabat ke bawah itu dapat diketahui dari perluasan pengertian *walad*: anak laki-laki maupun anak perempuan dan keturunannya. Hanya, di kalangan Sunni makna anak itu dibatasi pada anak laki-laki dan anak perempuan serta cucu melalui anak laki-laki dan anak perempuan.

- 3) Asas *individu*. Dengan asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum waris Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

Asas *individual* hukum waris Islam ini diperoleh dari kajian aturan al-Quran mengenai pembagian warisan. Ayat 7 surat an-Nisa,

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 283-284.

misalnya, dalam garis-garis besar telah menjelaskan tentu yang hak laki-laki untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan perempuan berhak menerima harta warisan orang tua atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing) sudah ditentukan.

- 4) Asas keadilan berimbang. Perkataan adil terdapat banyak dalam al-Quran. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum waris di dalamnya. Oleh karena itu pula, dalam sistem ajaran Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia.<sup>47</sup> Dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
- 5) Asas yang menyatakan bahwa waris ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa waris semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum waris Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama waris, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 286-287.

maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori waris menurut hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk waris saja yaitu waris sebagai akibat dari kematian seseorang.<sup>48</sup>

## 2. Hikmah Waris Dalam Islam

Hukum waris, termasuk salah satu aspek yang di atur secara jelas dalam al-Quran dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa, masalah waris cukup penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem waris yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah. Sedikitnya ada empat macam konsep baru sebagai hikmah yang ditawarkan al-Quran ketika itu dan untuk seterusnya. *Pertama*, Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam waris di luar Islam orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak berketurunan. *Kedua*, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. *Ketiga*, suami isteri saling mewarisi. Satu hal yang bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan isteri sebagai salah satu bentuk harta warisan.

Hikmah waris yang lain ialah karena waris berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 288.



Pentingnya masalah hukum waris ini dapat dibuktikan melalui pesan Nabi kepada umatnya untuk mempelajarinya. Seperti sabda Beliau yang diriwayatkan Ahmad ibnu Hanbal:

Pelajarilah al-Quran dan ajarkanlah kepada orang banyak; pelajarilah pula faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak; karena aku adalah manusia biasa yang pada suatu ketika mati dan ilmupun akan hilang hampir-hampir dua orang bersengketa dalam *faraid* dan masalahnya, maka tidak dijumpai orang yang memberitahu bagaimana penyelesaiannya.<sup>49</sup>

Proses waris itu memiliki hikmah yang cukup penting bagi kehidupan muslim. Hikmah-hikmah tersebut antara lain; Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Apalagi kalau diingat bahwa sistem waris Islam memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami dan isteri, saudara-saudara bahkan cucu, kakek atau nenek. Bahkan dalam proses pembagian hartapun diajarkan agar ahli waris memberi atau menyedekahkan bagi orang-orang miskin dan yatim yang hadir khususnya di antara kerabat (QS. an-Nisa': 8), serta menyedekahkan harta peninggalan melalui institusi wasiat, baik kepada kerabat seperti ibu bapak dan di luar kerabat juga kepada isteri untuk menjaga kesejahteraannya (QS. al-Baqarah: 180 dan 240). Di samping itu masih ada hal lain, pewaris yang disalurkan melalui *baitul mal* (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Sebagai prevensi dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama (QS. an-Nisa': 37). Sebagaimana disebutkan di

---

<sup>49</sup> Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 231.

atas, setiap muslim diajarkan berwasiat dan memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang miskin. Ini mengisyaratkan bahwa Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja di antara kerabat tetapi juga di antara muslim dan bahkan di antara masyarakat umum. Hal ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis misalnya, di mana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan dan mendayagunakan kekayaan.<sup>50</sup> Akibatnya terjadi dua kutub yang saling berhadapan. Di satu pihak orang-orang miskin semakin terlantar karena tidak ada tumpuan atau institusi sebagai tempat bergantung. Di pihak lain terjadi penimbunan atau monopoli dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan.

Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Dalam Islam nilai usaha sangat ditekankan karena Allah akan memberi rezeki sesuai dengan yang diupayakan manusia (QS. an-Najm: 39). Dengan adanya semangat kerja dan etos kerja manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Sehingga ketika mereka meninggal akan memiliki kebanggaan karena mampu memberi harta warisan kepada yang ditinggalkan.

Bahkan Ismail Muhammad Syah, menyebutkan hikmah dalam kehidupan keluarga, Islam memandang bahwa pembagian harta

---

<sup>50</sup> Muhammad Abdullah al-Arabi, *Ekonomi Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, Jakarta: Sastra Hudya, 1979, hlm. 22.

peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan hubungan kasih sayang antar keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu dalam pembagian harta peninggalan itu harus didasari dengan keimanan kepada Allah dan kepatuhan dengan ikhlas terhadap ajaran-ajaran Allah seperti termaktub di dalam al-Quran, dengan pembagian harta peninggalan tersebut yang berdasarkan ajaran Allah akan digunakan untuk memenuhi material antar keluarga.<sup>51</sup> Dalam kehidupan bermusyawarah dengan pembagian waris berdasarkan asas-asas sebagaimana tersebut di atas, ajaran Islam membersihkan masalah harta dari tertumpuknya pada seseorang yang bukan haknya, dengan pembagian tersebut memberikan hak kepada semua anggota keluarga sesuai dengan kewajibannya dalam kekeluargaan yang berhubungan dengan orang yang meninggal. Oleh karena itu pembagian waris dalam Islam tidak hanya ditunjukkan kepada seseorang tertentu dari keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga lain dan tidak pula diserahkan kepada negara padahal ada anggota keluarga. Maka pembagian waris dalam Islam untuk mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga di dalam hidup bermasyarakat.<sup>52</sup>

### **3. Ahli waris dan macam-macamnya**

Ahli waris<sup>53</sup> adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan orang yang meninggal dunia. Dalam pembagian itu tidak seluruh ahli

---

<sup>51</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1992, hlm. 235.

<sup>52</sup> *Ibid*,

<sup>53</sup> Ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral ada tiga golongan ahli waris: (1) *dzul farraid* ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu, (2) *dzul*

waris pasti mendapat, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat kepada pewaris, dan ada yang jauh mengingat urutan masing-masing. Ahli waris dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>54</sup>

a. Ahli waris *nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *mawaris* berdasarkan hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, rinciannya sebagai berikut:

Ahli waris laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya:

- 1) Anak laki-laki (*al-ibn*)
- 2) Cucu laki-laki garis laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya ke bawah.
- 3) Bapak (*al-ab*)
- 4) Kakek dari bapak (*al-jadd min jihat al-ab*)
- 5) Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-Syaqiq*)
- 6) Saudara laki-laki seayah (*al-akh al-ab*)
- 7) Saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-umm*)
- 8) Anak laki-laki saudara sekandung (*ibn al-akh al-syaqiq*)

---

*qarabat* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau juga disebut juga memperoleh bagian sisa. (3) *Mawali* ialah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang menggantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi *mawali* ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris. Lihat dalam Sajuti Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm. 72-81.

<sup>54</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 50-52.

- 9) Anak laki-laki saudara seayah (*ibn al-akh li al-ab*)
- 10) Paman, saudara bapak sekandung (*al- 'amm al-syaqiq*)
- 11) Paman seayah (*al- 'amm li al-ab*)
- 12) Anak laki-laki paman sekandung (*ibn al- 'amm al-syaqiq*)
- 13) Anak laki-laki paman seayah (*ibn al- 'amm al-ab*)

Adapun ahli waris perempuan semuanya 8 orang yaitu:

- 1) Anak perempuan (*al-bint*)
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki (*bint al-ibn*)
- 3) Ibu (*al-umm*)
- 4) Nenek garis bapak (*al-jaddah min jihat al-ab*)
- 5) Nenek garis ibu (*al-jaddah min jihat al-umm*)
- 6) Saudara perempuan sekandung (*al-ukht al-syaqiqah*)
- 7) Saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ab*)
- 8) Saudara perempuan seibu (*al-ukt li al-Umm*)

b. Ahli waris *sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebab perkawinan, yaitu suami isteri.
- 2) Sebab memerdekakan hamba sahaya

Adapun dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- 1) Ahli waris *al-furud al-muqaddarah*, maksudnya bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an, seperti,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$  dan  $\frac{2}{3}$ .
- 2) Ahli waris *'asabah* adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *dzul faraid*, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*, atau tidak menerima apa-apa karena peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*.<sup>55</sup>
- 3) Ahli waris *dzul arham*, adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan.

---

<sup>55</sup> Hasniah Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 15.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KUH PERDATA**

### **A. Waris Menurut KUH Perdata**

#### **1. Pengertian**

Waris menurut A. Pitlo sebagaimana ditengarai Ali Afandi adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.<sup>1</sup>

Di dalam sistematika hukum perdata yang berlaku sekarang hukum waris dimuat dalam buku II KUH Perdata. Dengan demikian maka hak waris dianggap sebagai hak kebendaan.<sup>2</sup> A. Pitlo menganggap bahwa hukum waris adalah hukum kebendaan mungkin timbul berdasar atas dua pikiran, yaitu:

- a. Karena ahli waris mempunyai suatu hak yang tidak dipunyai oleh pewaris yaitu hak waris (terhadap barang-barangnya pewaris punya

---

<sup>1</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 7.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

hak milik, bukan hak waris). Jadi hak waris itu suatu hak yang berdiri sendiri; atau

- b. Karena harta warisan itu merupakan barang berdiri sendiri.<sup>3</sup>

Terhadap anggapan yang ada, dapat dikemukakan bahwa memang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 833 KUH Perdata, bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.<sup>4</sup> Sesungguhnya harta peninggalan itu bukan suatu hak atas barang yang utuh (bulat), menurut Pasal 1100 KUH Perdata warisan itu terdiri dari suatu kekayaan setelah dikurangi segala utang dan beban lain, sehingga warisan itu tidak mungkin berupa suatu kesatuan yang utuh dan tidak mungkin kiranya warisan itu beralih sebagai suatu barang yang berdiri sendiri.<sup>5</sup>

## 2. Unsur-unsur Pewarisan

Pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Adapun unsur-unsur warisan ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

- a. Pewaris (*erfater*), adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan (harta warisan).

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 10.

<sup>4</sup>*Ibid*.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 11.



- b. Ahli waris (*erfgenaam*), adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya dalam warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.
- c. Harta warisan (*erfenis*), adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>6</sup>

Harta kekayaan yang ditinggalkan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa:

- a. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*). Contoh rumah, mobil, tanah dan lain-lain.
- b. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (*passiva*)
- c. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri, harta bersama dengan sebagian yang dapat pula berupa:
  - 1) Harta bawaan suami atau istri atau istri atau suami saja yang diperoleh atau dimiliki sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing.
  - 2) Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami istri), misalnya karena

---

<sup>6</sup>Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 15.

menerima hibah warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan lain sebagainya.

- 3) Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua suami istri atau salah seorang dari mereka menurut undang-undang menjadi harta bersama.
- 4) Harta bersama yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami atau istri misalnya harta pusaka dari *klan* atau suku (*tribe*) atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya *klan* atau suku tersebut.<sup>7</sup>

### 3. Syarat-syarat Pewarisan

Untuk dapat mewarisi harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia

Menurut Pasal 830 KUH Perdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal tersebut mengandung suatu asas pokok hukum waris yaitu bahwa baru berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal. Jadi pewaris harus (sudah) mati, di samping harus dipenuhi syarat-syarat yang lain (ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia).<sup>8</sup>

Sehubungan dengan asas tersebut di atas (pewarisan karena kematian), Pasal 1334 KUH Perdata, menetapkan bahwa: “Barang-

---

<sup>7</sup>M. Idris Ramulya, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 102.

<sup>8</sup>J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 19.

barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu.

Contohnya: orang menjual hak waris yang akan diperolehnya (jadi pada saat itu sebenarnya belum ada hak warisnya) dari si pewaris kepada orang lain, atau si calon ahli waris (belum jadi ahli waris) melepaskan hak warisnya dengan imbalan sejumlah uang tertentu dari calon kawan warisnya.<sup>9</sup> Ketentuan tersebut kiranya merupakan konsekuensi logis dari Pasal 830 KUH Perdata, mengingat bahwa kita belum dapat berbicara tentang warisan, kalau si pewaris masih hidup.

Selanjutnya asas tersebut mendapat penerapannya lagi dalam Pasal 1063 KUH Perdata, dimana dikatakan bahwa dalam perjanjian kawinpun orang tak dibolehkan memperjanjikan akan melepaskan haknya atas warisan keluarganya yang masih hidup (calon pewarisnya), demikian pula orang tak dapat menjual hak-hak yang dikemudian hari akan ia peroleh dari suatu pewarisan. Larangan tersebut bukan didasarkan atas “haknya” yang baru akan ada dikemudian hari pada saat sekarang belum dipunyai olehnya tetapi

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 20.

karena yang demikian itu dianggap tidak patut (Vide Pasal 1334 KUH Perdata).<sup>10</sup>

- b. Untuk memperoleh harta peninggalan, orang harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 836 KUH Perdata dijelaskan bahwa supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang. Dan Pasal 899 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia.<sup>12</sup> Menurut pasal tersebut orang yang bertindak sebagai ahli waris, harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan.<sup>13</sup>

Asas tersebut selanjutnya harus ditafsirkan bahwa orang yang akan mewarisi selain dari pada ia telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris. Karenanya saat kematian dan kelahiran seseorang sangat penting dan dapat bersifat sangat menentukan.

Saat tersebut menentukan siapa saja yang berhak mewarisi dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris. Di samping itu saat meninggalnya pewaris mempunyai pengaruh yang penting sekali berhubungan dengan adanya ketentuan (Pasal 1083 KUH Perdata), bahwa tiap ahli waris dianggap langsung

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 21.

<sup>11</sup>Gregor Van Der Burght, *Hukum Waris Buku Kesatu*, (terj.) F. Tengker, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 31.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 235.

<sup>13</sup>J. Satrio, *op.cit*, hlm. 22.

menggantikan pewaris dalam hal memiliki barang-barang yang diperolehnya dengan pembagian.

#### **4. Kelompok-kelompok Ahli Waris**

Hukum waris (Erfrecht, KUH Perdata Pasal 830 dan seterusnya) ialah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

Tata hukum memberi jaminan dan perlindungan terhadap perbuatan sewenang-wenang atas kekayaan orang yang telah meninggal itu, dan menentukan siapa yang berhak atas harta kekayaan tersebut. Ada dua cara untuk menyelenggarakan pembagian warisan yaitu sebagai berikut:

- a. Pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat ke berapa yang berhak menerima warisan, adalah ditentukan oleh undang-undang (warisan karena kematian = warisan *ab intestato*). Pada pewarisan menurut undang-undang terdapat pengisian tempat (*plaatsvervulling*) artinya apabila ahli waris yang berhak langsung menerima warisan, telah mendahului meninggal dunia atau karena sesuatu hal dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris; maka anak-anaknya berhak menggantikan menjadi ahli waris dan demikianlah seterusnya. Apabila si pewaris yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan,

suami atau istri maupun saudara-saudara, maka terjadilah pedah dua (*kloving*), artinya warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama yaitu satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah menurut garis pancar bapak lurus ke atas dan satu bagian lain untuk keluarga yang sama garis pancar ibu.

- b. Pewarisan berwasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris. Wasiat itu harus dinyatakan dalam bentuk tulisan misalnya akte notaris (warisan *testamenter*).<sup>14</sup> Orang yang mewarisi disebut pewaris (*erflater*), orang yang menerima warisan karena hubungan darah yang ditentukan dalam undang-undang disebut ahli waris (*erfgenaam*) sedangkan orang yang menerima warisan karena wasiat disebut waris berwasiat (legataris) dan bagian warisan yang diterima oleh legataris disebut *legaat*.

Garis kekeluargaan untuk menetapkan warisan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- a. Garis menegak (*line*), ialah garis kekeluargaan langsung satu sama lain, misalnya: bapak kakek-kakek, bapak, anak, cucu, dihitung menurun, kalau sebaliknya dihitung menanjak.

---

<sup>14</sup>CST. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jilid 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 87.

- b. Garis mendatar (*zijlinie*) ialah garis kekeluargaan tak langsung satu sama lain, misalnya: paman bapak, paman, keponakan, dan seterusnya.<sup>15</sup>

Di samping itu ada bagian harta kekayaan yang disebut *legitieme portie* (bagian menurut Undang-Undang). Menurut ketentuan Pasal 913 KUH Perdata, *Legitieme portie* atau bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan surat wasiat. Garis lurus itu dapat garis lurus ke bawah atau garis lurus ke atas, artinya jika tidak ada ahli waris garis lurus ke bawah, maka ahli waris garis lurus ke atas berhak atas *legitieme portie* dan yang berhak atas *legitieme portie* disebut *legitimaris*.

Maksud diadakan ketentuan mengenai *legitieme portie* ialah untuk melindungi hak para ahli waris dari perbuatan pewaris yang tidak bertanggung jawab. Misalnya semua harta kekayaan dihibahkan dan wasiatkan kepada orang lain menurut kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan ahli warisnya. Padahal menurut Undang-Undang, para ahli waris mempunyai hak atas harta warisan.<sup>16</sup>

Undang-undang memandang ketentuan mengenai *legitieme portie* sebagai pembatasan kebebasan seseorang membuat surat wasiat menurut kemauannya sendiri. Oleh sebab itu pengaturannya ditempatkan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 294.

dari bagian mengenai hak mewaris menurut surat wasiat. *Legitieme portie* ahli waris dalam garis lurus ke bawah diatur dalam Pasal 914 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditetapkan besarnya *legitieme portie* sebagai berikut:

- a. Apabila hanya ada satu orang anak sah, *legitieme portie* adalah seperdua dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat.
- b. Apabila ada dua orang anak sah, *legitieme portie* untuk masing-masing anak adalah dua pertiga dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat.
- c. Apabila ada tiga orang anak sah atau lebih, *legitieme portie* untuk masing-masing anak adalah tiga per empat dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat.<sup>17</sup>

Sifat hukum waris Perdata Barat (KUH Perdata), yaitu menganut sistem sebagai berikut:

- a. Sistem pribadi; Bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
- b. Sistem bilateral; Yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun bapak.
- c. Sistem penderajatan; Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.<sup>18</sup>

Hukum waris *ab intestato* mengatur tentang penerimaan warisan dari seseorang yang meninggal dunia yang tidak mengadakan ketentuan-

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 295.

<sup>18</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 4.



ketentuan mengenai kekayaannya.<sup>19</sup> Menurut Pasal 832 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini”.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang wajib melunasi segala hutangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama sebagai ahli waris itu ada empat golongan, yaitu sebagai berikut:

Golongan I : Keturunan dari yang meninggal dunia ialah anak, suami atau istri yang hidup terlama dan cucu sebagai ahli waris pengganti.

Golongan II : Orang tua, saudara-saudara sekandung dan keturunannya dari yang meninggal dunia.

Golongan III : Leluhur dari yang meninggal dunia baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Golongan IV : Keluarga sedarah sampai derajat keenam.<sup>20</sup>

Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penggolongan ahli waris, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 149.

<sup>20</sup>R. Abdoel Djamal, *op.cit.*, hlm. 149..

- a. Kalau tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh pada negara.
- b. Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Jadi jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris.
- c. Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewarisi. Golongan III dan IV tidak mewarisi, tetapi golongan III dan IV adalah mungkin mewarisi bersama-sama kalau mereka berlainan garis.
- d. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan perbedaan umur.
- e. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, maupun pula saudara-saudara, maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859 KUH Perdata, warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama, ialah satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas, dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu (Pasal 853 KUH Perdata).
- f. Jelasnya apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada, maka yang mewarisi ialah golongan III dan atau golongan IV. Dalam hal ini maka harta warisan dibagi dua sama besar (disebut dalam bahasa Belanda

“Kloving”). Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengahnya lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.<sup>21</sup>

Bila orang yang meninggalkan warisan pernah kawin lebih dari satu kali, maka suami atau istri yang baru tidak boleh mendapat bagian yang lebih dari pada bagian yang paling kecil yang diperoleh tiap-tiap anak, sedangkan jumlahnya tidak boleh melebihi  $\frac{1}{4}$  dari warisan seluruhnya (Pasal 852 a KUH Perdata).<sup>22</sup>

Unsur-unsur yang perlu disoroti adalah sebagai berikut:

- a. Di sini sedang diteropong hak istri atau suami, dalam perkawinan kedua dan selanjutnya, atas warisan suami atau istrinya yang meninggal dengan meninggalkan warisan.
- b. Pewaris (suami atau istri yang mati tadi) dalam perkawinannya yang pertama mempunyai anak atau keturunan dari anak.
- c. Hak waris suami atau istri yang baru di sini dibatasi besarnya yaitu :
  - 1) Tidak boleh lebih besar dari hak bagian yang terkecil dari satu orang anak dari perkawinan yang pertama atau keturunan mereka sebagai pengganti anak tadi, jadi boleh sama besar dan;
  - 2) Tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{4}$  harta warisan si pewaris. Batasan maksimum adalah  $\frac{1}{4}$ .<sup>23</sup>

Jadi terhadap hak waris istri atau suami pada perkawinan yang kedua, dengan anak dari perkawinan yang pertama, diterapkan dua macam

---

<sup>21</sup>Effendi Parangin, *op.cit*, hlm. 34.

<sup>22</sup>Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 126.

<sup>23</sup>J. Satrio, *op.cit*, hlm. 115.

pembatasan; kalau bagian istri atau suami yang baru sama besarnya dengan hak bagian yang terkecil yang diterima oleh seorang anak dari perkawinan yang pertama (atau keturunannya sebagai pengganti), tetapi ternyata masih besar dari  $\frac{1}{4}$  warisan, maka hak istri atau suami dibatasi sampai  $\frac{1}{4}$  saja. Kalau ternyata hak bagian istri atau suami sama dengan atau lebih kecil maka kepada istri atau suami yang baru diberikan warisan yang sama besarnya dengan hak bagian yang terkecil dari seorang anak dari perkawinan pertama.<sup>24</sup>

Hukum waris wasiat mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum dari pembuatan wasiat itu. Ada 4 (empat) jenis wasiat, yaitu sebagai berikut:

- a. Wasiat umum ialah surat wasiat yang dibuat dihadapan seorang notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi. Wasiat umum ini sifatnya otentik dan sejak selesainya dibuat sampai pembuat meninggal dunia wasiat itu disimpan di kantor notaris.
- b. Wasiat *olographie* ialah surat wasiat yang ditulis sendiri kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal dunia.
- c. Wasiat rahasia ialah surat wasiat yang dibuat sendiri atau orang lain dan disegel kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal dunia.
- d. *Codisil* ialah suatu akta di bawah tangan yang isinya kurang penting dan merupakan pesan seseorang setelah meninggal dunia.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 166.

Isi surat wasiat umum, wasiat *olographie* dan wasiat rahasia menentukan pembagian waris bagi keturunannya sebagai kehendak pembuat dan dapat juga menetapkan seseorang sebagai ahli waris walaupun bukan keturunannya, sedangkan di dalam *codicil* hanya berisikan pesan misalnya mengenai permintaan tentang penguburan. Dalam hukum waris testamenter, sebelum harta peninggalan itu dibagikan para ahli waris keturunan terlebih dahulu mendapat *legitieme portie* yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan.<sup>25</sup>

## 5. Penerimaan dan Penolakan Warisan

Harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Harta warisan sering disebut dengan warisan saja. Harta warisan menjadi hak ahli waris. Dalam pengertian ini jelas bahwa pokok permasalahan dalam pewarisan itu adalah pada hak atas harta warisan bukan pada kewajiban membayar hutang pewaris. Kewajiban membayar hutang pewaris tetap ada pada pewaris, yang pelunasannya dilakukan oleh ahli waris dari harta kekayaan yang ditinggalkannya. Dalam pelunasan kewajiban pewaris itu termasuk juga pelunasan wasiat yang telah ditetapkan oleh pewaris. Harta warisan itu adalah harta kekayaan yang sudah bebas dari segala beban pewaris. Inilah yang menjadi hak ahli waris.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>R. Abdoel Djamali, *op.cit*, hlm. 150.

<sup>26</sup>*Ibid.*

Apabila dalam penerimaan warisan, harta kekayaan peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang, maka ahli waris dapat memilih di antara tiga kemungkinan yaitu sebagai berikut:

a. Penerimaan secara penuh (*Zuivere aanvaarding*)

Penerimaan secara penuh dapat dilakukan dengan tegas atau dilakukan dengan diam-diam. Dengan tegas apabila seseorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Dengan diam-diam apabila dengan melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya menerima warisan, misalnya melunasi hutang-hutang pewaris, mengambil atau menjual barang warisan (Pasal 1048 KUH Perdata). Tetapi perbuatan penguburan jenazah pewaris, penyimpanan warisan, mengawasi atau mengurus warisan untuk sementara waktu saja tidak dapat dianggap sebagai perbuatan penerimaan secara diam-diam (Pasal 1049 KUH Perdata).<sup>27</sup>

Kalau ahli waris sudah menerima sepenuhnya, maka ahli waris tersebut bertanggung jawab atas segala hutang warisan, milik pribadi ahli waris ikut menjadi harta pertanggung jawaban terhadap hutang-hutang warisan. Tetapi kalau ahli waris ini mendapat bagian-bagian warisan menurut ketentuan-ketentuan pembagian, maka pertanggungjawabannya juga sesuai dengan bagian yang diperolehnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 293.

<sup>28</sup>CST. Kansil, *op.cit*, hlm. 332.

b. Penolakan

Kalau mereka menolak, hal ini berarti bahwa mereka melepaskan pertanggung jawaban sebagai ahli waris, dan juga menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Hal ini sesuai dengan pasal 1057 KUH Perdata, akan tetapi kalau sama sekali menolak, sehingga tidak ada seorang ahli warispun yang ditunjuk oleh undang-undang, maka akibatnya kekayaan itu jatuh ke tangan negara (pasal 1020 KUH Perdata).<sup>29</sup>

c. Penerimaan dengan hak mengadakan pendaftaran warisan

(*Beneficiaire aanvarding*); yaitu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan. Apabila penerimaan warisan dengan hak mengadakan pendaftaran, maka menurut ketentuan Pasal 1023 KUH Perdata ahli waris yang bersangkutan harus menyatakan kehendaknya ini kepada Panitera Pengadilan Negeri dimana warisan itu telah terbuka.

d. Akibat dari penerimaan *Beneficiaire* ini ialah seperti yang ditentukan dalam Pasal 1032 KUH Perdata :

- 1) Ahli waris tidak wajib membayar hutang dan beban pewaris yang melebihi jumlah warisan yang diterimanya.
- 2) Ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran hutang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada para kreditur.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

- 3) Kekayaan pribadi ahli waris tidak dicampur dengan harta warisan, dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari harta warisan itu.

Apabila setelah dikurangi dengan segala hutang pewaris, harta warisan itu masih mempunyai sisa, maka sisa itu merupakan hak ahli waris. Apabila ahli waris mempunyai hutang kepada pewaris, ia harus membayar hutangnya itu dan memasukkan ke dalam harta kekayaan peninggalan pewaris.<sup>30</sup>

## 6. Ketidakpatutan Menjadi Ahli Waris

Selain syarat bahwa yang bersangkutan harus ada dan masih hidup serta mempunyai hubungan darah dengan pewaris, atau suami atau istri yang hidup lebih lama, maka masih ada syarat lagi yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris, yaitu orang tersebut tidak dinyatakan “tidak patut (*onwaardig*)”.<sup>31</sup> Orang-orang yang tidak patut (pantas) ini adalah orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris, tetapi karena perbuatannya dianggap tidak patut menjadi waris.

Adapun perbedaan antara cakap dan patut adalah sebagai berikut: cakap, termasuk dalam bidang hukum waris *testamentair*; dan patut termasuk hukum waris menurut undang-undang (tanpa testament, kecuali Pasal 912 KUH Perdata yang masuk hukum waris *testamentair*)

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 294.

<sup>31</sup>J. Satrio, *op.cit*, hlm. 44.



kalau tidak cakap, pembatalan harus dituntut, kalau tidak patut, maka itu dengan sendirinya batal.<sup>32</sup>

Menurut Pasal 838 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah sebagai berikut:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

*Ad. a.* “yang telah dihukum” berarti bahwa untuk masalah tersebut telah ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat. Tanpa adanya keputusan pengadilan tentang *onwaardigheid* (ketidakpatutan) atas dasar pembunuhan atau percobaan pembunuhan. Maka akibatnya kalau sementara perkara berjalan, tertuduh meninggal sebelum ada putusan, maka tertuduh

---

<sup>32</sup>Ali Afandi,*op.cit*, hlm. 51.

belum dapat dikatakan *onwaardig*, sehingga keturunannya merupakan keturunan ahli waris biasa (keturunan orang yang *waardig* yang patut).

Hal ini berarti bahwa kalau tertuduh seandainya ia masih hidup adalah ahli waris dari orang yang dalam perkara yang bersangkutan, dikemukakan sebagai orang yang dibunuh olehnya, maka keturunan si tertuduh dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris.<sup>33</sup> Gratie yang diberikan kepada tertuduh tidak menghapus kesalahannya hanya mengampuni dan karenanya tidak membebaskan terhukum dari *onwaardigheid*.

*Ad. b.* Di sini syarat adanya penghukuman oleh pengadilan disebutkan dengan tegas, yaitu dengan adanya kata-kata: “dengan putusnya hakim”. Menurut Meyers di sini tidak perlu keputusan tersebut merupakan suatu keputusan peradilan pidana seperti pada *ad. a*, tetapi keputusan peradilan perdata pun sudah cukup untuk mengakibatkan *onwaardigheid* (ketidakpatutan) yaitu keputusan peradilan perdata yang berisi penghukuman terhadap si ahli waris, dalam bentuk penggantian kerugian kepada pewaris, atas dasar dicemarkannya kehormatan dan nama baik pewaris karena pengaduan yang bersifat fitnah dari si ahli waris. Misalnya tuntutan ganti rugi Pasal 1372 KUH Perdata dan pasal 1373 KUH Perdata.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>J. Satrio, *op.cit*, hlm. 45.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 46.

Syarat *a* dan *b* di atas merupakan syarat yang sesuai dengan moral manusia pada umumnya. Kalau orangnya saja dibunuh atau coba dibunuh atau difitnah, tentu tidak pantas ia menerima warisannya. Di samping itu kalau ketentuan yang demikian itu tidak ada, maka dikhawatirkan akan kemungkinan terjadinya lebih banyak kasus-kasus pembunuhan demi harta.

*Ad. c.* Di sini tidak disebutkan adanya syarat keputusan pengadilan. Pitlo mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita sekarang, hampir tidak mungkin orang dengan menggunakan kekerasan atau perbuatan lain, untuk suatu jangka waktu yang lama mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut *testamen*. Jadi di sini yang dimaksud adalah perbuatan atau kekerasan yang dilakukan menjelang matinya orang. Ketentuan ini merupakan peraturan yang layak dapat diterima. Orang pada dasarnya mempunyai kebebasan kecuali ada pembatasan-pembatasan tertentu atas harta benda yang menjadi miliknya, termasuk bebas untuk memberikannya kepada orang lain dari pada “si tidak patut”. Dengan pencegahan oleh “si orang yang tidak patut” terhadap kehendak orang yang akan membuat atau mencabut *testamen*, berarti bahwa ia menghalang-halangi kemerdekaan atau wewenang si pembuat *testamen* calon pembuat *testamen* untuk menentukan kepada siapa dan bagaimana hartanya akan dibagikan. Besar sekali kemungkinannya pewaris hendak menyingkirkan hak waris “si tidak patut” atau setidaknya

tidaknya mencegah “si tidak patut” menikmati warisannya, sebesar haknya menurut Undang-Undang.<sup>35</sup>

*Ad. d. Juga* di sini tidak diisyaratkan adanya keputusan hakim. Menggelapkan di sini artinya menyembunyikan di suatu tempat sehingga orang lain tidak mengetahui di mana adanya, jadi menggelapkan di sini bukan dalam arti Pasal 372 KUH Perdata tetapi dalam arti Pasal 137 KUH Perdata dan 1031 KUH Perdata. Sebenarnya sulit kita membayangkan pengrusakan testamen karena menurut KUH Perdata *testamen* umum harus dibuat di hadapan notaris. Memalsukan *testamen*, akta notaris tidak mudah.<sup>36</sup>

## **B. Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata**

Menolak adalah salah satu sikap ahli waris terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Penolakan menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus dilakukan dengan tegas (tanpa syarat) dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum terbukanya harta warisan. Menolak harta warisan sama halnya dengan melepaskan hak atas harta warisan.<sup>37</sup> Maka syarat lain dari penolakan adalah harus dilakukan setelah peristiwa kematian (meninggalnya pewaris). Pada pasal 1334 ayat 2 KUH Perdata juga dikatakan bahwa tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>37</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, edisi revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, cet. 2, hlm. 47-48.

terbuka. Konon ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan etis atau moral, yakni melepaskan atau menolak harta warisan yang belum terbuka sama halnya dengan menyuruh orang tua supaya cepat mati. Sebagai akibat dari penolakan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Kedudukan sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada.
2. Bagiannya bukan jatuh kepada kawan waris yang lain. Hal ini akan menjadi jelas perbedaannya bilamana ada testamen yang bisa dilaksanakan, maka bagian mutlak kawan waris yang lain tidak mencakup bagian ahli waris yang menolak itu, melainkan jatuh kepada penerima testamen.
3. Keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewarisi karena pergantian tempat.
4. Jika ada testamen dari pewaris yang ditujukan atau diperuntukkan buat orang yang menolak, maka testamen tersebut tidak bisa dilaksanakan (pasal 1001 KUH Perdata).
5. Jika orang yang menolak pernah menerima hibah dari pewaris, maka hibah tersebut tidak wajib dimasukkan kembali (inbreng) ke dalam harta warisan pewaris (pemberi hibah), kecuali hibah tersebut menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak itu.
6. Yang ditolak hanya menyangkut harta warisan atau harta peninggalan pewaris saja dan penolakan itu harus ikhlas serta tidak diembeli dengan syarat-syarat lain. Misalnya, menolak, namun menghendaki agar tanah

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49.

milik pewaris dibagian tertentu saja yang mau diwarisi. Jika ada penolakan dengan persyaratan seperti itu, berarti penolakan tidak sah.

Walaupun demikian, ada prinsip yang mengatakan bahwa seorang ahli waris yang telah menolak harta warisan secara sah dianggap tidak pernah berkedudukan sebagai ahli waris. Namun ada pasal lain juga yang memberi kemungkinan yuridis kepada ahli waris yang telah menolak secara resmi memulihkan kembali kedudukannya sebagai ahli waris.<sup>39</sup> Pasal yang dimaksudkan itu adalah pasal 1056 KUH Perdata yang secara singkat mengatakan bahwa ahli waris yang telah menolak harta warisan masih dapat menerima kembali selama ahli waris lain yang berhak belum menerima bagian atas harta warisan tersebut. Pengertian ahli waris lain mencakup ahli waris karena ketentuan Undang-undang maupun berdasarkan ketentuan testament.

Pemulihan pernyataan penolakan yang dimaksud KUH Perdata tersebut di atas hanya sah apabila penolakan itu memang dilakukan atas kesadaran dan kemauan yang ikhlas dari ahli waris. Demikian pula jika berkeinginan untuk membatalkan surat penetapan penolakan harus didasarkan pada ketulusan hati atau keikhlasan dari ahli waris yang telah menolak itu. Agak mengherankan kalau ketentuan pasal-pasal tersebut jika kita perbandingan satu dengan lainnya. Menurut salah satu pasal dikatakan bahwa ahli waris yang telah menolak tidak dapat dipulihkan kembali kedudukannya sebagai ahli waris, kecuali penolakan itu dilakukan atas dasar paksaan atau penipuan. Jadi penolakan yang dilakukan karena ditipu atau

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

dipaksa pihak lain masih dapat dipulihkan, sedangkan menurut pasal yang lain penolakan atas dasar sukarela tidak bisa dipulihkan.

Apakah larangan pemulihan penolakan yang dimaksudkan oleh pasal pertama adalah apabila pernyataan pemulihan penolakan yang dilakukan sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak atau setelah semua harta warisan dibagi kepada ahli waris lain yang tidak menolak? Karena pasal 1056 KUH Perdata terletak sebelum pasal 1064 KUH Perdata, yang mana pasal 1056 KUH Perdata telah memberi kemungkinan untuk memulihkan penolakan asal sebelum harta dibagi kepada ahli waris lain tidak menolak, maka besar kemungkinan maksud yang terkandung dalam pasal 1056 KUH Perdata: *pertama*, pemulihan penolakan tidak berguna lagi apabila diajukan setelah harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak. *Kedua*, meskipun harta warisan telah dibagi seluruhnya kepada ahli waris lain, namun pernyataan pemulihan penolakan masih berguna jika penolakan itu terjadi karena ada unsur penipuan atau paksaan.

Dalam praktek, penerapan kedua pasal di atas sangat tergantung pada notaris jika dipercayai oleh para pihak untuk membuat akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia.<sup>40</sup> Sekedar pemberitahuan kepada para notaris, bahwa kesalahan notaris merupakan makanan lezat bagi para pengacara. Kiranya perumpamaan ini direnungkan lebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan pasal 1056 KUH Perdata dan pasal 1065 KUH Perdata tersebut di atas

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

yang mengandung kontradiksi. Di mana dalam pasal 1056 KUH Perdata disebutkan bahwa para ahli waris yang telah menolak warisan itu, masih dapat menyatakan bersedia menerima, selama warisan itu belum diterima oleh orang yang mendapat hak untuk itu dari Undang-undang atau dari surat wasiat, tanpa mengurangi hak-hak pihak ketiga. Sedangkan dalam pasal 1065 KUH Perdata disebutkan bahwa tiada orang pun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan, kecuali bila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan. Oleh karena itu kedua pasal tersebut harus dipahami secara komprehensif, sehingga dalam aplikasinya tidak terjadi kontradiksi pemaknaan dalam praktek pelaksanaannya. Hal ini juga merupakan kehati-hatian dalam mengambil dan memutuskan suatu perkara dalam perspektif hukum.



## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KUH PERDATA PASAL 1057

#### A. Analisis Terhadap Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Sebagai agama wahyu, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia. Aspek-aspek ajaran Islam tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu aspek ajaran Islam tersebut adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kewarisan. Kewarisan merupakan salah satu masalah yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an, yang pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Islam itu sendiri, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajarannya yang pokok. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. (النساء: 11-12)

Artinya: (11) Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12) Dan bagi kamu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu peroleh satu perempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada ahli waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyantun (QS. An-Nisa': 11-12)

Dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka eksistensinya harus dijalankan dalam bentuk praktek

faktualnya. Pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Berkenaan dengan hukum kewarisan, Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menerima menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (KHI pasal 171.a). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (KHI pasal 172.b)

Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian. Sementara itu mengenai peralihan harta harta warisan bisa dilihat dalam pasal 187 KHI yakni sebagai berikut:

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
  - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang
  - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris.

- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.<sup>1</sup>

Dalam pasal tersebut khususnya pada ayat 2 terdapat kata "harus", hal ini menunjukkan "syarat", bahwa harta peninggalan pewaris yang sudah meninggal dunia menjadi hak penuh bagi ahli waris yang ada. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Peralihan harta warisan dari pewaris ke ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah, bukan menurut kemauan pewaris atau ahli waris.
- 2) Peralihan harta warisan terjadi setelah matinya pewaris, karena itu tidak boleh melakukan pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia.

Sedangkan mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan siapa ahli waris yang dimaksud, pengelompokkannya dapat dilihat dalam pasal 174 KHI sebagai berikut:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari; duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>2</sup>

Hukum Islam yang menyangkut persoalan keluarga termasuk hukum warisnya telah lama dikenal dan digunakan di belantara negara ini. Hal

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Banjarmasin: AKAPRESS, 1992, hlm. 159.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 156-157. Bisa dilihat juga dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 345-346.

yang mendasari masyarakat menggunakan hukum ini sangat terkait dengan kemauan sendiri sebagai konsekuensi iman dan penerimaannya terhadap hukum Islam tersebut. Untuk itu kiranya perlu hukum Islam dijadikan sandaran sebagai dasar pembentukan hukum nasional. Asumsi ini dapat dikatakan terlalu subjektif dan *ngoyoworo*, namun kemungkinan hal ini dapat direalisasikan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan maksud produk hukum nasional nantinya merupakan representasi dari hukum Islam itu sendiri, meskipun secara redaksionalnya tidak dengan jelas disebutkan kata-kata "Islam", akan tetapi ruh-ruh Islam telah memasuki dan mewarnai hukum nasional tersebut.

Di Indonesia sampai sekarang belum tersusun kitab hukum Fiqh Islam yang lengkap tentang *al-akhwal al-syahsiyah* termasuk hukum waris, yang tidak berorientasi pada mazhab, tetapi berorientasi terhadap kemaslahatan dan kemajuan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan (ulama).

Hukum Islam, terutama hukum warisnya telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia atas dasar kehendak sendiri yang dilandasi oleh kesadaran akan keimanan yang dimilikinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum Islam dijadikan sumber pelaksanaan hukum waris. Dalam sisi lainnya dapat kiranya dijadikan sebagai wacana, di mana hukum waris Islam yang berembrio dari hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber utama terhadap hukum waris nasional. Hal ini mengandung arti

bahwa hukum waris dalam Islam dapat dijadikan sebagai sandaran utama dalam pembuatan hukum waris nasional. Hukum waris dalam Islam tidak hanya berbicara dari satu pihak, akan tetapi semua pihak yang berkaitan dengan pewaris dibahas di dalamnya, di samping itu juga hukum waris Islam juga mengkedepankan kemaslahatan di antara sesama ahli waris yang ada, sehingga dalam perjalanannya semua ahli waris dapat hidup dalam kedamaian dengan ahli waris lainnya, karena semuanya sudah memahami dan menerima apa pun ketentuan ataupun kesepakatan bersama di antara ahli waris yang ada. Oleh karena demikian jelas bahwa ternyata konsep Islam itu benar-benar *rahmatan li al 'alamin* yang berimplikasi juga terhadap prospek penggalan hukum nasional yang pada akhirnya dikembalikan kepada citra hukum Islam itu sendiri. Hal ini juga dibuat sebagai pijakan/dasar dalam hal waris. Islam ajarannya sangat komprehensif, jadi sudah sewajarnya jika ada masalah, apapun permasalahan itu, tentunya harus dikembalikan dan disandarkan pada ajaran Islam yang ada.

Selanjutnya masalah waris dalam Islam tidak hanya berkutut masalah pembagian, akan tetapi sangat banyak. Hal ini dikarenakan orang yang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan ahli waris, maka ada persoalan-persoalan kewarisan yang perlu diselesaikan. Kemudian setelah ahli waris sudah lengkap dan pembagiannya sudah jelas, juga masih timbul suatu persoalan yaitu adanya penolakan terhadap harta warisan di antara sebagian ahli waris yang ada. Tentunya dalam memahami persoalan ini harus hati-hati dalam arti tidak mudah memutuskan dan menilai penolakan tersebut, akan

tetapi harus dengan cermat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak dilakukan dengan cermat dan diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Sebelum pembagian harta warisan tersebut dilakukan ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris yang sudah meninggal dunia, yaitu sebagaimana termaktub dalam pasal 175 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut:

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah
  - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
  - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang
  - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
  - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggungjawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>3</sup>

Sedangkan berkaitan dengan pembagian tersebut dapat dilihat dalam pasal 176 s.d. pasal 182 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.(pasal 176 KHI)  
 Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian (pasal 177 KHI)

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (pasal 178 KHI)

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (pasal 179 KHI)

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian (pasal 180 KHI)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian (pasal 181 KHI)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan (pasal 176 KHI).<sup>4</sup>

Namun perlu diketahui bahwa dalam proses pembagian hartapun diajarkan agar ahli waris memberi atau menyedekahkan bagi orang-orang miskin dan yatim yang hadir khususnya di antara kerabat (QS. an-Nisa': 8), serta menyedekahkan harta peninggalan melalui institusi wasiat, baik kepada kerabat seperti ibu bapak dan di luar kerabat juga kepada isteri untuk menjaga kesejahteraannya (QS. al-Baqarah: 180 dan 240).

Ini mengisyaratkan bahwa Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja di antara kerabat tetapi juga di antara muslim dan bahkan di antara masyarakat umum. Hal ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 157-158.



misalnya, di mana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan dan mendayagunakan kekayaan.<sup>5</sup> Akibatnya terjadi dua kutub yang saling berhadapan. Di satu pihak orang-orang miskin semakin terlantar karena tidak ada tumpuan atau institusi sebagai tempat bergantung. Di pihak terjadi penimbunan atau monopoli dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan. Oleh karena itu dalam pembagian harta peninggalan itu harus didasari dengan keimanan kepada Allah dan kepatuhan dengan ikhlas terhadap ajaran-ajaran Allah seperti termaktub di dalam al-Qur'an, dengan pembagian harta peninggalan tersebut yang berdasarkan ajaran Allah akan digunakan untuk memenuhi material antar keluarga.

Begitu juga Islam dalam hal penyelesaian dan perselisihan mengenai penolakan yang dilakukan sebagian ahli waris. Penolakan tersebut seyogyanya diartikan sebagai pemberian hak penuh kepada sebagian ahli waris sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga yang berhubungan dengan orang yang meninggal (pewaris), jadi Islam membolehkan asal yang melakukan penolakan tersebut benar-benar ahli waris yang sah. Oleh karena itu penolakan waris dalam perspektif hukum Islam tidak hanya ditunjukkan kepada orang tertentu dalam keluarga, tanpa memberi kepada anggota keluarga lain, maka penolakan waris dalam Islam itu harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga di dalam hidup bermasyarakat. Hal ini membuktikan bahwa, masalah kewarisan cukup penting dalam agama

---

<sup>5</sup> Muhammad Abdullah al-Arabi, *Ekonomi Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, Jakarta: Sastra Hudya, 1979, hlm. 22.

Islam. Apalagi Islam pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah. Sedikitnya ada empat macam konsep baru sebagai hikmah yang ditawarkan al-Qur'an ketika itu dan untuk seterusnya. *Pertama*, Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak berketurunan. *Kedua*, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. *Ketiga*, suami isteri saling mewarisi. Satu hal yang bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan isteri sebagai salah satu bentuk harta warisan.

Di samping proses kewarisan itu memiliki hikmah yang cukup penting bagi kehidupan muslim. Hikmah-hikmah tersebut antara lain; Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Apalagi kalau diingat bahwa sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami dan isteri, saudara-saudara bahkan cucu, kakek atau nenek.

Sekali lagi perlu ditekankan di sini bahwa penolakan waris yang dilakukan sebagian ahli waris yang sah merupakan hak mereka, oleh karena itu ahli waris lainnya harus memahami dan menyelesaikannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dalam arti memenuhi persyaratan yang ada dalam KUH Perdata pasal 1057 dan tidak mempunyai tujuan lain di balik

penolakan yang dilakukannya, di samping itu dari pihak yang mengajukan penolakan harus melepaskan hak warisnya.

Melihat hal ini Islam benar-benara memperhatikan orang-orang yang ditinggalkan pewaris. Islam sangat menghargai hak perseorangan dalam hal ini hak dan sikap semua ahli waris dalam memandang dan menerima bagian harta pusaka tersebut, sehingga dalam hal ini masing-masing individu dapat menentukan pilihannya tanpa adanya pemaksaan dari pihak lain, lebih-lebih dari ahli waris yang lain, karena semua itu sudah ada ketentuannya dan peraturannya dengan jelas, apabila salah satu melakukan penolakan terhadap harta warisan, maka lakukanlah dengan cara yang bijaksana yang mengkedepankan kemaslahatan di antara ahli waris, dan tanpa disertai dan dilatarbelakangi adanya pemaksaan dari pihak ketiga.

## **B. Analisis Terhadap Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata Pasal 1057**

Sebelum jauh berbicara mengenai penolakan waris, perlu dipahami bersama bahwa waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang pewaris jika ia meninggalkan hutang. Dengan demikian jelaslah bahwa waris itu disatu sisi berakar pada

keluarga dan di lain sisi berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota keluarga yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh pewaris. Peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, hubungan waris, yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, obyek waris yaitu harta warisan peninggalan pewaris. Semua ini diatur oleh hukum waris. Jika dirumuskan maka hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk. Dari rumusan ini dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian hukum waris itu sebagai berikut:

1. Subjek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat.
2. Peristiwa hukum waris, yaitu meninggalnya pewaris.
3. Hubungan hukum waris, yaitu hak dan kewajiban ahli waris.
4. Obyek hukum waris, yaitu harta warisan peninggalan pewaris.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ahli waris dalam memperoleh warisan adalah adanya pewaris (orang yang meninggal dunia) dan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Syarat tersebut penting sekali dalam pembagian waris. Kematian seseorang berakibat adanya

pewarisan. Tanpa adanya kematian seseorang tidak mungkin terjadi proses pewarisan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>6</sup> Sedangkan mengenai seorang ahli waris, dia harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia atau pada saat terbukanya warisan.

Kaitannya dengan penolakan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1057 KUH Perdata:

*"Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberi pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka". (ps. 1057 KUH Perdata)*

Melihat pasal tersebut maka kaitannya dengan analisis dalam penelitian ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang yaitu *gramatikal*, *historis* dan *teleologis*.

#### 1. Gramatikal

Maksud gramatikal di sini adalah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.<sup>7</sup> Oleh karena itu melihat bunyi dan teks pasal tersebut, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami bersama, yaitu *penolakan*, *warisan*, *dengan tegas*, *pernyataan*, *kepaniteraan*, *pengadilan negeri*, dan *hukum kewarisan*. Dari beberapa istilah tersebut dapat dimengerti arti dari masing-masing istilah tersebut.

---

<sup>6</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 221.

<sup>7</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 164.

*Penolakan*, dalam pasal tersebut maksudnya adalah suatu tindakan atau ucapan yang dilakukan oleh sebagian ahli waris dalam rangka menolak harta warisan yang menjadi haknya karena hubungan dengan pewaris yang sudah meninggal dunia. Jadi dapat dimengerti bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris dari pewaris tersebut. Dengan demikian bahwa menolak harta warisan sama artinya melepaskan hak atas harta warisan yang ada padanya dan ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan etis atau moral, yakni melepaskan atau menolak harta warisan yang belum terbuka sama halnya dengan menyuruh orang tua supaya cepat mati. Oleh karena itu seorang ahli waris yang telah menolak harta warisan secara sah dianggap tidak pernah berkedudukan sebagai ahli waris.

*Warisan*, dalam pasal tersebut maksudnya adalah segala harta yang diwariskan (*al-mauruuts*) disebut pula peninggalan dari pewaris yang sudah meninggal. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>8</sup> Hal ini

---

<sup>8</sup> Mahfud MD.,dkk., (penyunting), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 214.

berarti bahwa semua harta peninggalan pewaris menjadi hak penuh bagi ahli waris yang ada.

Sementara itu maksud istilah *dengan tegas*, dalam pasal tersebut adalah bahwa penolakan yang dilakukan oleh sebagian ahli waris terhadap harta warisan itu harus dilakukan dengan tegas, jelas, tidak berbelit dan tanpa adanya paksaan dan ancaman dari ahli waris lain. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa penolakan menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus dilakukan dengan tegas (tanpa syarat) dan harus dilakukan ketika pewaris meninggal dunia.

*Pernyataan*, dalam pasal tersebut maksudnya adalah pernyataan yang dilakukan oleh ahli waris yang menolak harta warisan baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi penolakan tersebut dilakukan tidak hanya dengan ucapan / lisan akan tetapi diperkuat dan pertegas dengan pernyataan tertulis. Pernyataan tersebut diberikan di kepaniteraan pengadilan negeri. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya aturan tersebut segala kemungkinan perselisihan di antara ahli waris yang ada dapat diminimalisir. Dalam praktiknya pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang penitera. Dalam melaksanakan tugasnya penitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang penitera muda, beberapa orang panitera pengganti dan beberapa orang juru sita.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

*Hukum kewarisan* dalam pasal tersebut maksudnya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>10</sup>

Dari keseluruhan makna di atas, dapat ditarik simpulan bahwa maksud pasal tersebut adalah penolakan yang dilakukan sebagian ahli waris terhadap harta warisan merupakan hak individu/personal yang dilindungi oleh dasar hukum. Jadi penolakan itu boleh asal dilakukan dengan tegas serta adanya pernyataan yang jelas di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri.

## 2. Historis

Historis di sini maksudnya adalah dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undang-undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Jika pengertiannya dimungkinkan tidak ditemukan, akan tetapi setidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen mengenai pembuat undang-undang tersebut. Karena dari dokumen tersebut akan diperoleh informasi mengenai pembahasan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.<sup>11</sup>

Sebelum membicarakannya lebih lanjut terlebih dahulu perlu dipahami bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

<sup>11</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 165.



hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.<sup>12</sup> Sedangkan secara sistematis hukum perdata dibagi menjadi 4 (empat) bidang, yaitu hukum orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan dan hukum waris. Dengan demikian waris merupakan bagian hukum yang ada dalam KUH Perdata. Sementara itu manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak perdata. Sedangkan hak perdata itu sendiri dibagi dua bagian yaitu hak yang bersifat mutlak dan hak yang bersifat relatif (hak perorangan).<sup>13</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa penolakan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap harta warisan dari pewaris yang ada merupakan hak pribadi ahli waris yang bersangkutan. Jadi ahli waris yang lain tidak bisa dan tidak boleh mencampuri serta mempengaruhi ahli yang melakukan penolakan tersebut.

Kaitannya dengan pasal 1057 KUH Perdata, bahwa penolakan harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut didasari dengan adanya pertanggungjawaban hukum pewaris yang masih bisa dipersoalkan, yaitu menyangkut kasus perdata, bisa dibebankan kepada ahli warisnya. Pertanggungjawaban beban hukum itu bahkan tak bisa dikurangi, meski ahli waris pewaris tidak terlibat langsung dalam perkara itu. Oleh karena itu, ahli waris juga ikut bertanggungjawab atas perkara (perdata) yang harus dipertanggung

---

<sup>12</sup> Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 6. Bisa dilihat dalam Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 14

<sup>13</sup> Djaja S. Meliala, *ibid.*, hlm. 38.

jawabkan pewaris yang sudah meninggal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 286:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ قُلْ .... (البقرة: 286)

*Artinya: ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. Al-Baqarah: 286)*

Ketidaksediaan ahli waris menerima warisan agar terhindar dari tanggung jawab hukum akan sangat sulit dibuktikan secara hukum. "Orang kaya kan pasti meninggalkan harta kekayaan". Di samping itu penolakan menerima warisan itu sendiri diatur dalam pasal 1057 KUH Perdata. Ketentuan itu menyatakan, penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas dan harus dinyatakan di kepaniteraan pengadilan negeri pada daerah hukum setempat. Jadi, seseorang tidak menerima warisan hanya jika telah dinyatakan bukan berstatus ahli waris. Akan tetapi kalau tidak ada ahli waris, harta kekayaan seseorang jatuh kepada negara.

Dengan demikian pasal tersebut menjadi pedoman dalam melakukan penolakan, sehingga benar-benar ahli waris yang melakukan penolakan dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan mengenai setting sosial yang melatar belakangi munculnya pasal tersebut diantaranya adanya pelimpahan status hukum pewaris yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga melihat hal ini timbul perbedaan di antara ahli waris yang ada, sebagian ada yang menerima dan sebagian yang lain menolak. Oleh karena itu yang menjadi pijakan hukum

tentang boleh tidaknya ahli waris melakukan penolakan terhadap harta peninggalan pewaris adalah pasal tersebut.

### 3. Teleologis

Teleologis disini maksudnya adalah mencari tujuan atau maksud dari suatu perundang-undangan,<sup>14</sup> dalam hal ini pasal 1057 KUH Perdata. Dengan demikian pasal 1057 KUH Perdata diterbitkan dengan tujuan yaitu agar tanggung jawab pewaris secara hukum perdata dapat diselesaikan meskipun pewaris tersebut sudah meninggal, hal ini dilakukan karena pewaris tersebut masih meninggalkan ahli waris. Oleh karena itu dalam prakteknya sangat tergantung pada notaris jika dipercayai oleh para pihak untuk membuat akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Hal ini juga merupakan kehati-hatian dalam mengambil dan memutuskan suatu perkara dalam perspektif hukum perdata. Di samping itu juga perlu diketahui bahwa ahli waris yang menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang yang termasuk harta warisan, maka kehilangan wewenang untuk menolak warisannya, ia tetap sebagai ahli waris murni, meskipun ia menolak, dan tidak boleh menuntut suatu bagian pun dari barang yang dihilangkan atau disembunyikannya.

Hukum perdata sudah mengatakan seperti itu, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika seseorang hendak melakukan penolakan terhadap harta warisan yang merupakan haknya, seyogyanya dilakukan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

dengan transparan di antara keluarga, sehingga tidak menimbulkan keruwetan dan kekisruhan di antara ahli waris yang ada.

Di samping itu adanya aturan penolakan tersebut menunjukkan bahwa tujuan adanya aturan tersebut adalah menghargai hak individu dalam melakukan dan menentukan sikap hukum kaitannya dengan harta peninggalan pewaris yang sudah meninggal. Secara yuridis hak perseorangan/individu dalam perspektif hukum perdata sangat dijunjung tinggi dan dihargai. Sedangkan secara implisit pasal tersebut mengakui hak penolakan yang dilakukan oleh individu-individu yang berhubungan dengan pewaris.

Dari ketiga sudut pandang tersebut dapat dimengerti bahwa penolakan menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus dilakukan dengan tegas (tanpa syarat) dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dilakukan ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya aturan tersebut segala kemungkinan perselisihan di antara ahli waris yang ada dapat diminimalisir.

Sementara kaitannya dengan pemulihan atau pencabutan pernyataan penolakan yang dimaksud KUH Perdata hanya sah apabila penolakan itu memang dilakukan atas kesadaran dan kemauan yang ikhlas dari ahli waris. Demikian pula jika berkeinginan untuk membatalkan surat penetapan penolakan harus didasarkan pada ketulusan hati atau keikhlasan dari ahli waris yang telah menolak itu. Dengan kata lain tidak seorang pun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan, kecuali

bila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan (KUH Perdata pasal 1056). Akan tetapi di sini yang paling urgen lagi adalah bahwa pemulihan dan pencabutan pernyataan penolakan tersebut jangan dilakukan setelah harta warisan dibagi ke semua ahli waris yang ada.

Melihat fenomena penolakan tersebut, tentunya bagi ahli waris yang ingin melakukan penolakan harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, sehingga tidak semauanya melakukan penolakan terhadap harta pusaka tersebut. Keikhlasan dan ketulusan dikedepankan sehingga pada akhirnya bisa menerima apapun putusan dari pengadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan paparan dan interpretasi data yang ada serta mengacu pada landasan teori penolakan harta warisan oleh ahli waris dalam penelitian ini maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam terhadap ketentuan KUH Perdata Pasal 1057 tentang penolakan harta warisan

Dalam Islam mengenai harta warisan sudah diatur sedemikian rupa, akan tetapi dari pihak yang bersangkutan ada yang menolak atau menghendaki penolakan tersebut, boleh dengan cara yang baik diantaranya dengan persetujuan semua ahli waris yang ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam arti memenuhi persyaratan yang ada dalam KUH Perdata pasal 1057 dan tidak mempunyai tujuan lain di balik penolakan yang dilakukannya tersebut. *Walhasil*, penolakan waris dalam Islam itu harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga di dalam hidup bermasyarakat.

2. Ketentuan waris menurut KUH Perdata Pasal 1057 tentang penolakan harta warisan

Penolakan menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus dilakukan dengan tegas (tanpa syarat) dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum

terbukanya harta warisan. Menolak harta warisan sama artinya dengan melepaskan hak atas harta warisan yang ada. Syarat lain bagi yang ingin menolak harta warisan adalah harus dilakukan setelah peristiwa kematian. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari penolakan tersebut di antaranya; (1) kedudukan sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada, (2) bagiannya bukan jatuh kepada kawan waris yang lain. Hal ini akan menjadi jelas perbedaannya bilamana ada testamen yang bisa dilaksanakan, maka bagian mutlak kawan waris yang lain tidak mencakup bagian ahli waris yang menolak itu, melainkan jatuh kepada penerima testamen, (3) keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewarisi karena pergantian tempat, (4) jika ada testamen dari pewaris yang ditujukan atau diperuntukkan buat orang yang menolak, maka testamen tersebut tidak bisa dilaksanakan (pasal 1001 KUH Perdata), (5) jika orang yang menolak pernah menerima hibah dari pewaris, maka hibah tersebut tidak wajib dimasukkan kembali (inbreng) ke dalam harta warisan pewaris (pemberi hibah), kecuali hibah tersebut menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak itu, dan (6) yang ditolak hanya menyangkut harta warisan atau harta peninggalan pewaris saja dan penolakan itu harus ikhlas serta tidak diembeli dengan syarat-syarat lain. Misalnya, menolak, namun menghendaki agar tanah milik pewaris dibagikan tertentu saja yang mau diwarisi. Jika ada penolakan dengan persyaratan seperti itu, berarti penolakan tidak sah.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi semua ahli waris dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan seyogyanya mengkedapankan unsur kekeluargaan dari pada unsur normatifitas hukum, sehingga di antara ahli waris diharapkan terjalin komunikasi dan dapat menerima dengan tanpa disertai tindakan yang kurang santun di antara sesama ahli waris.
2. Bagi ahli waris yang berkehendak untuk menolak harta warisan yang sudah mestinya haknya, agar ketika melakukan penolakan jangan sampai dilakukan sebelum pewaris itu meninggal, di samping itu agar melakukannya tanpa unsur keterpaksaan dan terpaksa.
3. Bagi pihak yang meleraikan dalam hal warisan apalagi kaitannya dengan penolakan waris, maka seharusnya dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana serta memperhatikan aturan-aturan yang ada.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun sudah penulis usahakan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan dan sangat dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf, atas segala kekurangan dan kesalahan serta penulis berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat



khususnya bagi diri penulis sendiri dan umumnya bagi semua pihak yang benar-benar membutuhkannya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Banjarmasin: AKAPRESS, 1992.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Al-Arabi, Muhammad Abdullah, *Ekonomi Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, Jakarta: Sastra Hudya, 1979.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* juz 8, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.
- Al-Husaini, Ishak Musa, *Ikhwanul Muslimin*, (terj.) Jakarta: Grafiti Press, 1993.
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 998.
- Al-Mulabari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-Syarbani, *Mughni al Muhtaj*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nail al-Authar, Syarh al-Muntaqa al-Akbar, Kitab al-Faraid*, juz 6, al-Babi al-Halaby wa Auladuhu, Mesir, 1347H.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VIII, Dar al-Fikr, Damsyiq, cet. 3.
- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, cet. 2.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, cet. 1.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *Al-Jami' ash-Shaghir*, juz II, Indonesia: Dar Ihaya' al-Kutub al-'Arabiyah, tth.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet 1.

- Budiono, A. Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Burght, Gregor Van Der, *Hukum Waris Buku Kesatu*, (terj.) F. Tengker, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk., ( editor) *Dalam Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001.
- Djamal, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hadi, Surisno, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hanbal, Imam Ahmad ibn, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Hasan, Hasniah, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kansil, CST., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jilid 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981.
- HS., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- MD., Mahfud, dkk., (peny.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

- Nata, Abdudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawai'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Ramulya, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Islam (Study Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*, Jakarta: Indo-Hillco, 1984.
- Rifa'i, Moh., dkk., *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Terj. Mudzakir A.S, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1973.

